

**STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis
Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau**



Oleh :

**NAMA : ANDRI SATRIA
NPM : 167122004
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

**STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

TESIS

Oleh

**Andri Satria
NPM : 167122004**

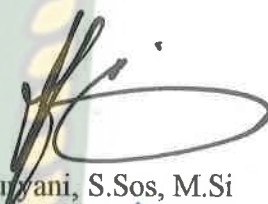
TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Sekretaris



Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

Anggota I



Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos, M.Si

Anggota II



Arief Rifal Harahap, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Si

**STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

TESIS

Nama : Andri Satria
NPM : 167122004
Program Studi : Ilmu Administarsi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, 30 - 4 - 2020


Dr. Nurman, S.Sos, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, 29 / 4 - 2020


Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau


Lilis Suryani, S.Sos, M.Si



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 367/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Andri Satria
NPM : 167122004
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 Maret 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi

Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

STRATEGI KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Satria



From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis 2)

- Processed on 30-Mar-2020 11:59 +08
- ID: 1284996313
- Word Count: 19243

Similarity Index

15%

Similarity by Source

Internet Sources:

15%

Publications:

2%

Student Papers:

6%

sources:

- 1 2% match (Internet from 06-Jul-2019)
<http://eprints.walisongo.ac.id/5944/3/BAB%20II.pdf>
- 2 1% match (Internet from 05-Aug-2019)
<https://iaaipusat.wordpress.com/tag/cagar-budaya/>
- 3 1% match (Internet from 15-Mar-2020)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>
- 4 1% match (Internet from 16-Jan-2020)
<http://arief14016.blogspot.com/2017/03/proposal-proyek-akhir-rancang-bangun.html?showComment=1489461938192>
- 5 1% match (Internet from 04-Dec-2018)
<https://f3dhia.blogspot.com/2011/08/makalah-por.html>
- 6 1% match (Internet from 28-Oct-2019)
<http://www.riadailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>
- 7 1% match (Internet from 18-Mar-2020)
<https://id.123dok.com/document/yjo3j7pz-rancangan-peraturan-daerah-kabupaten-cilacap-tentang-cagar-budaya.html>
- 8 1% match (Internet from 08-Nov-2010)
http://disbun.kuansing.go.id/_uploads/2010/06/perda_4_2008.pdf
- 9 1% match (Internet from 19-May-2019)
<https://www.scribd.com/doc/55328628/tugas-reka>
- 10 1% match (student papers from 08-Aug-2019)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 048/UIR/KPTS/PS-IA/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- nimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-II/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- etapkan : 1. Menunjuk :
a. Nama : Dr. Nurman, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing I
b. Nama : Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II
- Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
Nama : ANDRI SATRIA
N P M : 167122004
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : "PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL 17 April 2018
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92.11.02.199

busan : Disampaikan Kepada :
1h. Bapak Koperlis Wilayah X di Padang
1h. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
1h. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru
1h. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
ertinggal D:ASK_BIMBINGAN_doc_linda

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRI SATRIA
NPM : 167122004
Tempat/Tanggal Lahir : BASERAH, 28 AGUSTUS 1994
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI (S2)
Alamat : PASAR BARU PANGEAN
Judul Tesis : STRATEGI KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN DALAM
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Magister Sains (M.Si) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 April 2020

Yang menyatakan,



(ANDRI SATRIA)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul **Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

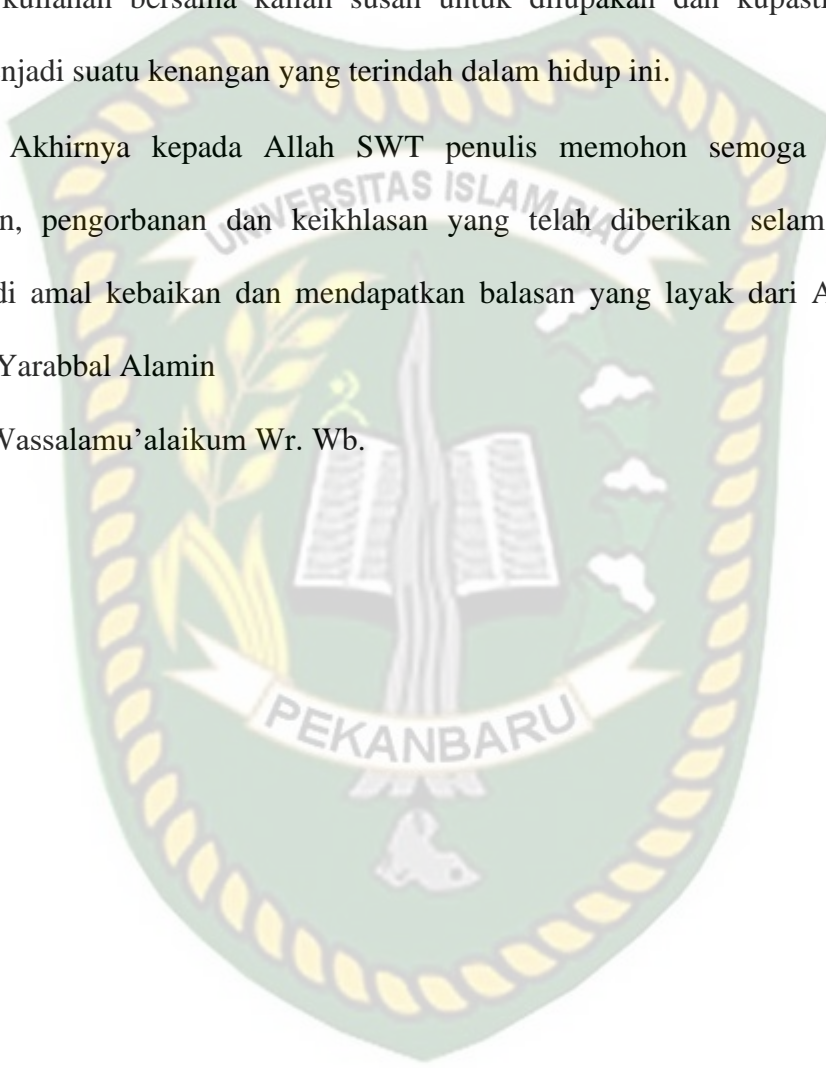
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana belajar sehingga penulis dapat menimba ilmu dengan maksimal.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos. M.Si, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Kepala dan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Kepada ayahanda, ibunda, kakak, abang dan adik tercinta, terima kasih atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah

engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau (UIR); terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	29
1.3 Tujuan Penelitian	29
1.4 Manfaat Penelitian	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
2.1 Pengertian Administrasi	31
2.2 Konsep Perilaku Organisasi	41
2.3 Pengertian dan Fungsi Manajemen	45
2.4 Pengertian Kepemimpinan	51
2.5 Pengertian Strategi	57
2.6 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	59
2.7 Pengertian Kebudayaan.....	68
2.8 Pengertian Cagar Budaya	70
2.9 Pengertian Pariwisata	70
2.10 Kerangka Berpikir	73
2.11 Konsep Operasional	74
2.12 Operasional Variabel.....	75

BAB III METODE PENELITIAN	78
3.1 Tipe Penelitian	78
3.2 Lokasi Penelitian.....	78
3.3 Waktu Penelitian	78
3.4 Jenis dan Sumber data.....	78
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	80
3.6 Populasi dan Sampel	81
3.7 Teknik Analisis data.....	83
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	85
4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	85
4.2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	89
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	96
5.1 Strategi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi	96
5.2 Perlindungan	105
5.3 Penyelamatan	107
5.4 Rekapitulasi Pembahasan Kuisisioner	112
5.5 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengembangan Cagar Budaya yang ada	116
5.6 Hambatan-hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Kuantan Singingi	117

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	119
6.1	Kesimpulan.....	119
6.2	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK

Oleh

ANDRI SATRIA

Warisan budaya adalah warisan budaya sifat material, dalam bentuk objek bangunan, struktur, tapak, dan kawasan warisan budaya di darat atau di dalam air yang perlu dipelihara. Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan strategi ketua Jabatan Pelancongan dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penyelidikan dalam tesis ini adalah teknik wawancara deskriptif kualitatif yang diperoleh semasa kajian dan kemudiannya untuk pemprosesan dan analisis selanjutnya. Para informan kajian ini adalah Kepala Kantor Pelancongan dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan Warisan Budaya kurang optimal / tidak setuju, ini dapat diketahui dari jawaban informan yang berhubungan dengan penelitian dan faktor terkait. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan Warisan Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya sosialisasi dan tidak berfungsi di Kantor Pelayanan dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana tugas utama, fungsi dan kekurangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci: Warisan Budaya, Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**STRATEGY OF TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT IN THE
DEVELOPMENT OF CULTURE RESULT IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

ABSTRACT

By

ANDRI SATRIA

Cultural heritage is a cultural heritage of material properties, in the form of building objects, structures, sites, and areas of cultural heritage on land or in water that need to be maintained. The purpose of this study is to determine the strategy of the head of the Tourism and Culture Office of Kuantan Singingi Regency. The type of investigation in this thesis is a qualitative descriptive interview technique that was obtained during the study and then for further processing and analysis. The informants of this study were the Head of the Tourism and Culture Office of Kuantan Singingi Regency. So the authors can conclude that the strategy of the Department of Tourism and Culture of Kuantan Singingi Regency in the development of Cultural Heritage is less than optimal / disagree, this can be known from the answers of informants related to research and related factors. The Head of the Kuantan Singingi Regency Tourism and Culture Office in developing Cultural Heritage in Kuantan Singingi Regency is lack of socialization and does not function in the Kuantan Singingi District Service and Culture Office so that the public does not know how the main tasks, functions and shortcomings of Kuantan Singingi Regency are.

Keywords: Cultural Heritage, Tourism and Culture Service Strategy.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia kaya dengan cagar budaya, kebudayaan, sejarah dan keindahan alam yang bisa di jadikan tempat pariwisata yang bisa menjadi pemasukan perekonomian oleh suatu negara terkhususnya daerah, dan memperkenalkan suatu kebudayaan yang bernilai jual tinggi yang mampu bersaing di internasional, Salah satu yang bisa dijadikan sebagai objek pariwisata, dan menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah yaitu cagar budaya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat / atau di air yang perlu dilestakan keberadaanya. Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau pun kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. *Sumber (UU RI No 11 Thn 2010 tentang Cagar Budaya).*

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berding dan atau tidak berding, dan beratap. Struktur cagar budaya dalah susunan binaan, yang terbuat dari benda alam, dan atau benda buatan manusia untuk

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat, dan di air yang mengandung benda cagar budaya dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Sedangkan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan, dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- e. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- f. Bersifat bergerak atau tidak bergerak
- g. Merupakan kesatuan atau kelompok.

- h. Berunsur tunggal atau banyak.
- i. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- c. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
- d. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- e. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu
- f. Menunjukkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
- g. Menunjukkan bukti pembentukan lanskap budaya.
- h. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- i. Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. *Sumber (UU RI No 11 Thn 2010 tentang Cagar Budaya).*

Cagar budaya dapat melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. yang bisa dijadikan objek wisata, yang meningkatkan nasionalisme, nilai jual dan nilai saing terhadap daerah-daerah lain, dan bisa menjadikan identitas sebuah daerah jangan sampai cagar budaya serta benda bersejarah dimiliki oleh pihak asing, masyarakat sering meninggalkan pengetahuan tentang sejarah, dan budaya yang ada di daerah mereka sendiri, terkhususnya pemuda pada saat ini.

A. Cagar Budaya Menurut Aspek Politik

Jika dilihat dari aspek politik cagar budaya dapat dipergunakan untuk menunjuk satu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan. Dalam artian ini terkandung isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Dua, politik di dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, atau dengan kata yang lebih singkat adalah kebijaksanaan. Kecenderungan baru ini lebih berperan dalam mendiskripsi tinggalan arkeologi secara lebih lengkap dan lebih sistematis daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Lebih berarti lagi, utamanya di negara-negara kolonial, munculnya akeologi nasionalistik “ketika bercampur dengan rasa kekhawatiran akan martabat dari keberadaan umat manusia”, telah memberikan pertolongan perlawanan terhadap kolonialisme dan rasisme, dimana ke duanya sering memakai samaran (Philip L.Kohl dan Clare Fawcett, 2000).

Demikian pentingnya politik identitas dalam pengelolaan cagar budaya maka Henry Cleere mengatakan bahwa ada tiga pokok kepentingan yang ada dalam pengelolaan cagar budaya, yakni kepentingan ideology dalam kaitannya dengan jati diri bangsa (politik), kepentingan akademik serta kepentingan ekonomi dalam kaitannya dengan pariwisata (Henry Cleere, 1990). Ideologi yang berlandaskan pada politik identitas pada dasarnya memang dipakai sebagai acuan di dalam pengelolaan cagar budaya, sebab menurut ideologi ini pemahaman yang mendalam akan identitas bangsa atau jati diri bangsa akan membawa bangsa tersebut ke arah kesatuan dan persatuan yang kuat.

Seperti sudah disinggung di muka bahwa di negeri kita tercinta ini pengelolaan cagar budaya yang bermuatan politik diawali dengan didirikannya Oudheidkundige Dienst in Nederlandsche-Indie pada tanggal 14 Juni 1913. Sejak saat itu, semua urusan yang berkaitan dengan warisan budaya di negara ini termasuk upaya untuk mengumpulkan, mendaftarkan, meneliti, serta melestarikan dan memanfaatkannya menjadi urusan negara. Peran negara menjadi semakin kuat dengan diterapkannya Monumenten Ordonnantie No.19 tahun 1931 Staadblad 238. Ketentuan dalam ordonansi itu menyiratkan begitu besar penguasaan negara atas warisan budaya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya MO 1931 merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin akses mereka terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia. Dengan begitu, para peneliti dan peminat bangsa cagar budaya yang mayoritas orang Eropa dapat lebih leluasa melakukan eksplorasi sumber daya budaya itu (Tanudirjo, 2003). Pengelolaan cagar budaya yang bermuatan politik identitas muncul ketika Undang Undang

No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya diterbitkan. Dalam bagian konsideran disebutkan menimbang : “bahwa benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional (Anonim, 1992). Namun di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, nampaknya makna politik identitas yang tertuang dalam jati diri bangsa tersebut sudah tidak digunakan sebagai konsideran tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasan atas undang-undang tersebut. Seperti diketahui bahwa di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010, terutama bagian konsideran menyebutkan sebagai berikut: “bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Anonim, 2010). Dari perbedaan konsideran ke dua undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa politik identitas (jati diri bangsa) yang pada awalnya merupakan elemen sangat penting dalam pertimbangan untuk penyusunan undang undang cagar budaya tersebut, nampak bergeser menjadi kepentingan ekonomi masyarakat (untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat).

Sudah tentu pergeseran ini disebabkan karena pergeseran politik pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi. Hal ini menjadi lebih jelas ketika di dalam penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu disebutkan bahwa “Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat” (Anonim, 2010).

Dikutipnya paradigma desentralisasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa didalam pengelolaan cagar budaya saat ini juga tidak akan terlepas dengan sistem pemerintahan Otonomi Daerah. Sistem manajemen pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan. Sistem pemerintahan ini dalam pelaksanaannya belum memberikan kejelasan bagaimana seharusnya dilembagakan dalam sistem pemerintahan. Ketiga azas pemerintahan itu sebenarnya ingin memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Miftah Thoha, 2009). Oleh karena itu ketika kita mengikuti begitu saja sistem tersebut dalam pengelolaan cagar budaya, maka sudah barang tentu akan terdapat bias esensi pekerjaan terhadapnya, mengingat bahwa pekerjaan pelestarian cagar budaya merupakan pekerjaan khusus dan penuh dengan muatan akademik.

B. Cagar Budaya Menurut Aspek Ekonomi

Ketika kita lihat cagar budaya dari aspek ekonomi yaitu perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pesona alam yang indah, warisan budaya dan

kesenian yang tinggi dan menarik, aneka ragam adat istiadat, peninggalan masa lampau yang bernilai, serta keramahan masyarakatnya merupakan daya tarik yang besar dan tidak akan ada habis-habisnya bagi wisatawan mancanegara. Peran serta masyarakat dalam menggarap objek-objek wisata sangat diperlukan.

Ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Hal yang perlu dipahami dengan baik adalah, bahwa manfaat ekonomi ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata, tetapi merupakan dampak positif dari keberhasilan pemanfaatan cagar budaya dalam pariwisata. Kelemahan umum yang dijumpai pada manajemen pengelolaan situs dan cagar budaya adalah kecenderungan pihak pengelola untuk memperlakukan situs dan cagar budaya sebagaimana layaknya sumber daya yang terbaharui, bahkan tidak jarang dijumpai dilakukan modernisasi situs maupun temuannya. Jika disadari, peristiwa ini justru telah menghilangkan nilai budaya dan historis yang dikandungnya. Terlebih lagi dalam perspektif pendidikan dan ilmu pengetahuan, situs hanya bermanfaat jika masih berada pada kondisi yang sebenarnya. Upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (33) dinyatakan bahwa: *“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memertahankan kelestariannya”*.

Artinya, cagar budaya dapat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Jangan sampai suatu cagar budaya diesploitasi secara maksimal, tanpa memperhatikan kelestariannya, sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan itu bukan disebabkan oleh kesengajaan, melainkan oleh ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip pemanfaatan cagar budaya. Prinsip pokok itu adalah pemanfaatan dengan mempertahankan kelestarian cagar budaya. Dengan kata lain, pelestarian dan pemanfaatan tidak dalam posisi berhadap-hadapan, tidak berlawanan, melainkan “bergandengan tangan” untuk kesejahteraan rakyat.

C. Cagar Budaya Menurut Aspek Budaya

Hal yang paling penting ketika cagar budaya dilihat dari aspek budaya yaitu cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepur-bakalaan” objek secara bertahap menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus berkurang tanpa dapat dicegah.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan

apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (sustainable) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) harapan rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh generasi mendatang. Kekayaan konsep budaya yang sangat potensial dijadikan landasan bertindak untuk memajukan peradaban ini dikhawatirkan akan terkebiri jika peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di tingkat nasional ini lebih banyak menekankan pada peninggalan arkeologis semata. Sasaran pelestarian yang semula hanya meliputi objek fisik, seperti dokumen tertulis dan monumen, memang sudah berkembang pula mencakup ranah lingkungan binaan, seperti lingkungan bersejarah, taman atau ruang terbuka, dan kota pusaka. Cakupan pelestarian yang lebih utuh akan melingkupi pula pelestarian unsur alam, yang mencakup bentuhan di bentang alam daratan dan di perairan / badan air (Sidharta dan Eko Budiharjo, 1989).

Pelestarian sering dipahami sebagai pengawetan tanpa bisa melakukan perubahan di dalamnya. Memang pada suatu sumber daya tertentu perlu dilakukan aksi pelestarian dengan melakukan pengawetan (*preservation*) tanpa perubahan sama sekali. Namun, pada sumber daya pusaka atau budaya yang lain justru perlu dilakukan perubahan, baik melalui penambahan maupun penggantian demi

kelangsungan hidup pusaka itu. Dalam penerapannya, praktik pelestarian cagar budaya atau benda arkeologis di Indonesia jamak bersentuhan dengan istilah sumber daya budaya (*cultural resources*). Sumber daya budaya menurut Fowler, seperti yang dikutip oleh Kusumohartono dalam Rangkuti (1996) adalah gejala fisik, baik alamiah maupun buatan manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, arsitektur, arkeologi, dan perkembangan budaya manusia.

Dari penuturan cagar budaya diatas dapat kita lihat salah satu daerah yang berada di Kepulauan Sumatra yang kaya akan tradisi, serta cagar – cagar budaya yaitu Provinsi Riau yang banyak benda bersejarah yang bisa dijadikan pengetahuan dan objek pariwisata, salah satu daerah yang terdapat benda cagar budaya yaitu Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi yang disebut juga dengan negeri rantau kuantan pada awalnya adalah wilayah suatu kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan kandis yang berdiri pada abad 8 Masehi yang berpusat di Padang Candi Dusun botuang, Desa sangau, Kuantan Mudik, kemudian pindah ke Sintuo Kuantan Tengah. Kerajaan kandis sebagai cikal bakal negeri Rantau Kuantan, Kerajaan Kandis juga disebutkan dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca bahwa daerah – daerah di Sumatera yang termasuk dalam kerajaan Majapahit diantaranya disebutkan pula Kerajaan Kandis.

Situs Padang Candi merupakan bekas Kerajaan Koto Alang yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kandis. Padang Candi yang terdapat di Desa Sangau Dusun Botuang Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat beberapa peninggalan sejarah dan cagar budaya. Selain kerajaan kandis dan beberapa kerajaan kecil

yang berada di Kuantan Singingi, ada suatu kerajaan yang masih lengkap cagar budaya yaitu Kerajaan Koto Rajo yang dahulunya di pimpin oleh Raja Ismail yang bergelar dengan Raja Pendek.

Desa Kenegerian Koto Rajo, kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, kaya dengan kebudayaan dan nilai-nilai sejarah masa kerajaan sebelum penjajahan, Di desa tersebut terdapat sebuah Meriam peninggalan zaman Kerajaan rumah adat bagonjong, keturunan Raja rumah adat pagaruyuang yang berada di daerah Sumatra Barat, Meriam atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan sebutan Lelo, Lelo atau Meriam tersebut kondisinya sangat tidak terawat, dan sungguh Memprihatikan, Lelo tersebut diletakkan di atas tanah, di perkebunan Warga, yang mana kondisinya sudah di tumbuh rumput, dan lobang Meriam tersebut sudah di masuki tanah, dan ada beberapa Lelo yang di letak di dalam rumah adat, tapi kondisi Rumah adat tersebut, sangat tidak layak, untuk benda-benda bersejarah, selain itu juga ada disimpan beberapa kitab dan benda bersejarah lainnya, seperti barang-barang antik peninggalan Kerajaan rumah adat bagonjong. Masih ada keturunan kerajaan yang bermukim disekitar tersebut, yaitu keturunan raja ke lima dari kerajaan rumah adat begonjong tersebut. Infrastruktur menuju akses rumah adat begonjong, boleh dikatakan tidak layak, dan petunjuk arah menuju objek wisata tersebut pun tidak ada.

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pun sudah terdata sebagai situs cagar budaya, kurang nya perhatian pemerintah terhadap sejarah dan situs – situs peninggalan yang ada diwilayah Kuantan Singingi. Dan acuh tak acuh nya,

masyarakat serta pemuda terhadap cagar budaya tersebut, Sehingga menyebabkan ketidak tahu akan sejarah pengetahuan wilayah kuantan singingi itu sendiri.

Dari beberapa situs kerajaan dan benda-benda cagar budaya yang terdapat dikuantan singingi, masih banyak yang tidak terawat dan terdata di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kuantan singingi, tetapi tidak sesuai dengan program dan peraturan bupati kuantan singingi nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan, yaitu pada pasal 11 poin kedua dan poin ketiga disebutkan:

1. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kebudayaan, pengkajian sejarah, museum dan nilai-nilai tradisioanal, kesenian.
2. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan, pengajiaan sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional kesenian.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian

- d. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional kesenian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dilihat dari tabel matrik program indikatif tahun 2013 – 2017 Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki banyak anggaran dan itu hanya untuk program tentang kepariwisataan dan kebudayaan, dan tidak termasuk cagar budaya dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. Matrik Program Anggaran Indikatif Tahunan

NO	Fungsi/sub fungsi/program	Indikator Pagu Anggaran (Rp)				
		Alokasi 2014	Alokasi 2015	Alokasi 2016	Alokasi 2017	Alokasi 2018
I	Pengembangan pemasaran pariwisata	174,950,000	284,857,000	821,161,500	903,277,650	993,605,415
II	Pengembangan destinasi pariwisata	97,462,500	225,193,900	1,313,709,735	439,726,620	485,017,018
III	Pengembangan kemitraan	266,968,000	45,281,953	429,586,046	371,523,953	419,002,546
Jumlah		539,380,500	555,332,853	2,564,457,281	1,714,528,223	1,897,624,979
Rata-rata		179,793,500	185,110,951	854,819,094	571,509,408	632,541,660

Sumber: *Disparbud Kuantan Singingi Tahun 2018*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yang paling besar terdapat pada Tahun

2016, sedangkan anggaran paling kecil terdapat pada Tahun 2014. Namun, di dalam anggaran ini tidak ada termasuk perawatan dan pengembangan cagar budaya yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi setiap kecamatan yang berjumlah 15 Kecamatan terdapat cagar budaya berikut nama cagar budaya setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nama– Nama Cagar Budaya, Situs Dan Tempat Bersejarah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Desa	Nama Situs Dan Cagar Budaya
1	2	3	4
1	Kuantan Mudik	1. Desa Kasang (bukit betabuah)	a. Bukit bakar b. Kerajaan damna c. Bukit selasih
		2. Desa Koto Lubuk Jambi	a. Makam syekh hanafi b. Kobun manggis dan tugu bambu runcing c. Mustika gajah tunggal
		3. Desa Air Buluh	a. Kuburan keramat datuk janguik b. Padang lunak
		4. Desa Kinali	a. Brangkas kuno jepang
		5. Desa Bukit Kauman	a. Rimbo Bunian
		6. Desa Sungai Manau	a. Pematang Kancah
		7. Batang Ontan	a. Kunanggan
		8. Desa Pebaun Hulu	a. Stempel datuk tambaro
		9. Desa Sangau	a. Padang candi b. Arca lembu
		10. Desa Sungai Kelelawar	a. Aur besurat dan pincuran betuah

1	2	3	4
		11. Desa Banjar Padang	a. Lopak gajah mati b. Tugu Kapten Fasilah
		12. Desa Luai	a. Batu patah
		13. Pasar Lubuk Jambi	a. Tugu Proklamasi
		14. Desa Sungai Manau	a. Oguang garunguik
		15. Desa Saik	a. Keris berhulu burung garuda
		16. Desa Pasar Lubuk Jambi	a. Gading gajah tunggal b. Keris maja pahit
2	Hulu Kuantan	1. Desa Sampurago	a. Koto sampurago b. Makam ma'rifat mardjani
		2. Desa Sungai Pinang	a. Makam keramat datuak kociak (tokoh agama) b. Lesung batuKoto tuo sungai pinang
		3. Desa lubuk ambacang	a. Monumen pemerintah darurat
		4. Desa koto kombu	a. Makam datuk kombar koto
3	Gunung Toar	1. Desa Tebarau Panjang	a. Sungai rao b. Pematang kanchah c. Rimbo marontang
		2. Desa Siberobah	a. Dapur umum kerajaan b. Kuburan bukit keramat
		3. Desa Petapahan	a. Kuburan keramat rimbo montang b. Bukit selasih
		4. Desa Gunung	a. Rimbo cibodak
		5. Desa Pulau Rumpit	a. Sungai lobuang
		6. Desa Pisang Berebus	a. Tugu senapan

1	2	3	4
4	Singingi	1. Kelurahan Muara Lembu	a. Makam syekh ahmad bunda b. Makam raja pagaruyung VIII c. Makam tuan gadih nan alui reno sari bunda d. Makam tuan pakih toking e. Makam datuk jalo sutan I dan Makam mad ali f. Makam datuk sinaro nan putieh I g. Batu vila T.821 Belanda h. Tugu Proklamasi i. Situskerajaan dangtuanku j. Al-Quran tulis tangan tuanku syech ahmad bunda k. Cap/stempel perunggu/kerajaan l. Cap Jabatan datuk bandaro
		2. Desa Pulau Padang	a. Makam datuk sampono rajo di poco b. Makam tuan indomo basa ampek balai c. Keris kelok tiga, tombak silopu, dan pedang d. Pondak silantai balai, tombak sigelombang
		3. Desa Pangkalan Indarung	a. Makam ninik putieh darah telunjuk b. Makam Ar-Rahman c. Cagar alam hutan lindung bukit cangkar puyuh d. Guci raksasa
		4. Desa Logas	a. Makam muhamad syarif b. Jalan kereta api
5	Singingi Hilir	1. Desa Petai	a. Situskerajaan imbang jayo
		2. Desa Koto Baru	a. Makam syekh ali
		3. Desa Koto Lamo	a. Makam keramat datuk batuah

1	2	3	4
6	Kuantan Tengah	1. Desa Koto Kari	a. Sumur raja b. Makam datuk bandaro lelo budi
		2. Desa Koto Taluk	c. Makam K. H. Oemar usman d. Makam jamalako sutan
		3. Desa Bandar Alai	a. Danau buayo
		4. Kelurahan Pasar Taluk	a. Makam Al-Azhar
		5. Desa Seberang Taluk	a. Sintuo
		6. Desa Jake	a. Makam datuk lin kunci
		7. Kelurahan Simpang Tiga	a. Kendi naga
		8. Desa Kopah	a. Surau ongku sumanik
7	Benai	1. Desa Tebing Tinggi	a. Danau seroja b. Tugu gajah putih
		2. Desa Koto Benai	a. Baju berantai sutan benai b. Tombak baranak
		3. Desa Talontam	a. Rawang Udang
		4. Desa Benai Kecil	a. Makam keramat mejan limo
		5. Tidak diketahui lagi keberadaanya	a. Makam abdullah syarib
8	Kuantan Hilir	1. Kelurahan Pasar Usang	a. Tugu proklamasi b. Lubuok sobe
		1. Desa Koto Tuo	a. Mesjid jamik koto tuo
		2. Desa Rawang Bonto	a. Makam keramat bukit batang karao
		3. Desa kepala pulau	a. Makam keramat tengku darah putie
9	Pangean	1. Desa Koto Pangean	a. Bukit sangkar puyuh b. Kuburan hantu pak buru c. Makam datuk baromban bosi d. Komplek makam bagindo rajo e. Komplek makam pendekar balang
		2. Desa Pauh Angit Hulu	a. Makam guru silat datuk untuik
		3. Desa Pematang	a. Komplek makam pendekar malin b. Masjid tua pematang
		4. Desa Tanah Bekali	a. Komplek makam pendekar rantau

1	2	3	4
10	Logas Tanah Darat	1. Desa Teratak Rendah	a. Kuburan pondam keramat
		2. Desa Loge	a. Kuburan tengku wat
11	Cerenti	1. Desa Koto Cerenti	a. Makam keturunan raja-raja b. Istana raja c. Pincuran tujuh d. Batu penobatan raja e. Bukit sangkar puyuh f. Makam pahlawan khatib sutan
		2. Desa Pulau Jambu	a. Bukit candi b. Rumah harun gemuk
		3. Desa Pesikian	a. Rumah H.Abd Rauf
12	Inuman	1. Desa Koto Inuman	a. Makam imam saleh b. Pulau singkiang c. Piring makan imam saleh
		2. Desa Bedeng Sikuran	a. Tenk baja Belanda
13	Sentajo Raya	1. Desa Kampung Baru	a. Rumah penghulu malin hikam b. Rumah tua pendekar bungsu uyut c. Badar bosi d. Ayat kursi yang ditulis pada lempengan kuningan e. Serban datuk simambang
		1. Desa Koto Sentajo	a. Masjid usang koto sentajo b. Komplek rumah godang c. Hutan lindung d. Balai bungo setangkai e. Tombak dan keris sakti
		2. Desa Pulau Komang	a. Makam keramat tongku karak. b. Makamdatuk simambang. Makam keramat tongku kunieng
		3. Desa Muaro Sentajo	a. Makam keramat datuk loban b. Makam keramat jubah merah.

1	2	3	4
14	Kuantan Hilir Seberang	1. Desa Koto Rajo	a. Isatana koto rajo b. Makam raja dan meriam
		2. Desa Lumbok	a. Rumah Moh. Nur rauf b. Lelo kerajaan
15	Pucuk Rantau	1. Desa Ibul	a. Tapak nabi daud
		2. Desa setiang	a. Kuburan keramat

Sumber : Disparbud Kuansing Tahun 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kuantan Singingi kaya akan situs-situs dan cagar budaya yaitu 15 Kecamatan yang terdapat di 70 desa se Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 133 cagar budaya yang harus diperhatikan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Tabel 1.3. Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 / Pagu Indikatif
1	2	3	4
PARIWISATA			799.906.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi	395.250.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	64.656.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata Daerah	50.000.000
5	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah	90.000.000

1	2	3	4
6	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Kerjasama dibidang Pariwisata	150.000.000
KEBUDAYAAN			1.865.000.000
9	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya dan Cagar Budaya</i>	<i>Meningkatnya Nilai – Nilai Budaya dan Cagar Budaya Daerah</i>	<i>400.000.000</i>
10	Program Pengembangan Nilai Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	100.000.000
11	Program Pengelolaan Keragaman Kebudayaan	Meningkatnya Khasanah Budaya Daerah	1.250.000.000
12	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya	Meningkatnya Pengembangan Kesenian Daerah	115.000.000

Sumber: Disparbud Tahun 2018

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa anggaran paling besar terdapat pada sektor kebudayaan sebesar Rp. 1.865.000.000. Sedangkan anggaran untuk paling kecil terdapat pada sektor pariwisata sebesar Rp. 799.906.000.

**Tabel 1.4. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Langsung
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kuantan Singingi**

No	Program Dan Kegiatan	Anggaran		Tingkat Capaian (%)	Permasalahan
		Alokasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Program Layanan Administrasi Perkantoran				
	A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	2,000,000.00	100,00	
	B. Penyediaan Jasa Komunikasi daya air dan Listrik	20,000,000.00	5,073,560.00	25,37	Telepon Kantor Sebanyak 2 Unit Tidak Dipakai hanya Biaya Beban yang Dibayar Perbulan Sehingga Anggaran Untuk Belanja telepon dikembalikan Ke KASDA sejumlah Rp 13,976,440.00
	C. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor	16,550,000.00	16,550,000.00	100,00	
	D. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,000,000.00	27,000,000.00	100,00	
	E. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,000,000.00	5,000,000.00	100,00	
	F. Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	100,00	
	G. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	100,00	
	H. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	100,00	
	I. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	7,200,000.00	4,870,000.00	100,00	
	J. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	10,000,000.00	67,64	
	K. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	320,000,000.00	319,149,626.00	100,00	Surat Kabar yang Masuk Ke Kantor Hanya 4 Jenis Surat Kabar Yaitu Riau Pos (Rp 150,000 X 12 Bulan) Haluan Riau (Rp. 110.000 X 12 Bulan) Surat Kabr Warna Sumatra (Rp 100.000 X 12 Bulan) dan Metro Riau (110 X 5 Bulan)
	L. Propaganda Penerangan dan Pameran	30,000,000.00	29,750,000.00	99,73	
	M. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	75,000,000.00	74,900,000.00	99,17	
				99,75	

1	2	3	4	5	6
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur A. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor B. Pengadaan Mebeleur C. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor D. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan E. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ F. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor G. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100,000,000.00 100,000,000.00 2,750,000.00 27,828,000.00 27,828,000.00 3,750,000.00 2,500,000.00	99,190,000.00 97,942,000.00 2,750,000.00 26,818,500.00 26,328,540.00 3,750,000.00 2,500,000.00	99,19 97,94 100,00 96,37 94,61 100,00 100,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000.00	49,500,000.00	99,00	
4	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya dan cagar budaya</i> A. Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Kabupaten dan Provinsi B. Pengelolaan Dewan Kesenian Kuantan Singingi C. <i>Pembangunan/ Renovasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bernilai Budaya</i> D. <i>Pembangunan Pagar Makam Keramat Dt. Tupang Mejan Desa sitiang</i>	50,000,000.00 245,565,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00	45,492,000.00 240,754,000.00 199.210.000,00 -	90,98 98,04 99,61 0,00	<i>Terlambatnya Pengesahan R-APBD sehingga waktu efektif untuk melaksanakan pembangunan pagar Makam Keramat Dt. Tupang Mejan Desa setiang tidak memungkinkan lagi</i>

1	2	3	4	5	6
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya A. Pawai Ta'aruf MTQ Tingkat Provinsi Riau 2017	100,000,000.00	97,915,000.00	97,92	
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya A. Pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional B. Penyelenggaraan Prosesi Budaya Daerah	1,100,000,000.00 104,435,000.00	1,092,414,900.00 104,435,000.00	99,31 100,00	- Bantuan uang pembinaan Pemenang pacu jalur tradisional Event Nasional tahun 2017 untuk juara XIV s/d XV dikembalikan sebesar Rp 4,000,000.00 karena jalur yang masuk pada hari ke empat hanya 12 Jalur - Bantuan Transportasi Peserta Event Nasional Pacu jalur Tahun 2017 dibayarkan sesuai dengan jumlah jalur yang datang yaitu 194 jalur x Rp 400,000.00, sementara yang termuat dalam DPA 200 jalur sehingga dikembalikan sebesar Rp 2,400,000.00
7	Program Pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya A. Pagelaran kesenian daerah B. Parade Tari daerah Tingkat kabupaten dan Provinsi	40,000,000.00 75,000,000.00	38,750,000.00 71,250,000.00	96,88 95,00	
8	Program Pemasaran Pariwisata A. Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Dalam rangka Sinkronisasi Program Kerja Antara Daerah dan Pusat	50,000,000.00	47,331,380.00	94,66	

1	2	3	4	5	6
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata A. Pemeliharaan sarana dan prasana Objek Wisata	90,000,000.00	72,000,000.00	80,00	Dalam kegiatan ini terdapat kode rekening Hoorarium Non PNS yang merupakan honor petugas penjaga objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai sebanyak 12 org x 12 bln, sedangkan petugas yang masuk dari bulan Januari s/d Juni 2017 hanya 3 org, sehingga honor untuk petugass yg 3 org lagi dikembalikan ke kas daerah yaitu sebesar Rp 18,000,000.00.
10	Program Pengembangan Kemitraan A. Sosialisasi Pengelolaan HomeStay Kabupaten Kuantan singingi	150,000,000.00	116,529,100.00	77,69	Terjadikeshalahan kode rekening pada mata anggaran jasa akomodasi panitia dan peserta (13 kmr x 3 hr) dengan nilai Rp 17,550,000.00, dimana anggaran ini tercantum pada kode rekening belanja Jasa transportasi sehingga dananya tidak bisa dicairkan
	Jumlah	3,142,906,000.00	2,939,653,606.00	93,53	

Sumber: Disparbud Tahun 2018

Dari Tabel 1.3 dan 1.4 Terlihat bahwa Rencana Kerja dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018. Dilihat dari hasil Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tidak langsung perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi yaitu: Alokasi 3,142,906,000.00: Realisasi 2,939,653,606.00 X 100 % = 93,53 % dapat dilihat masih ada sektor cagar budaya yang belum terlaksanakan yaitu: Alokasi,

$200.000.000 + 100.000.000 = 300.000.000$: Realisasi, $199.210.000,00 \times 100 \% = 1.9 \%$.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, sangat berperan penting dalam mengembangkan dan merawat benda-benda bersejarah serta cagar budaya tersebut, terdapat program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan yaitu, pembinaan SDM di bidang kepariwisataan, pengembangan nilai-nilai budaya tradisional Kuantan Singingi, Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah, pengembangan pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, promosi dan dokumentasi pariwisata dan kebudayaan kuantan singingi, penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi kepariwisataan. beberapa upaya pengembangan dan perawatan terhadap cagar budaya yang dilakukan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Pada Tahun 2008, tepatnya tanggal 23 oktober Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Drs. Syafrinal, M.Si pada saat itu instansi tersebut bernama Dinas Budaya Kesenian dan Pariwisata (Disbudskianipar) Kabupaten Kuantan Singingi. Pernah melakukan penelitian bekerjasama dengan arkeolog dari Padang Panjang Sumatera Barat yang bernama Prof. Suwardi. MS, yaitu berita nya yang dimuat dikoran kampus "Bahana Mahasiswa Universitas Riau" yang menjelaskan beberapa wawancara dari pihak pemerintahan, Drs. Syafrinal, M.Si kepala Disbudskianipar, mengatakan Banyaknya kelemahan yang kita alami dalam perawatan objek pariwisata dan situs-situs bersejarah salah satu penyebab nya dari kelemahan sumber daya

manusia (SDM) Untuk mengantisipasi, Syafrinal telah berusaha semaksimal mungkin, dan membentuk tim pengumpul data objek pariwisata dan situs sejarah di setiap kecamatan, Syafrinal mengharapkan sumbangsi kita bersama, dan pihak swasta yang mau menanamkan modalnya untuk pengembangan objek pariwisata dan situs bersejarah yang ada di Kab. Kuansing. Dan pada tahun 2013 Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Marwan, S.Pd, MM melalui Kepala seksi sejarah dan Cagar Budaya, Zulkandra telah mendata beberapa cagar budaya yang ada di kabupaten kuantan singingi yaitu terdapat cagar budaya yang ada di lima belas kecamatan di kabupaten kuantan singingi, baik bersifat benda peninggalan kerajaan ataupun peninggalan penjajahan, dan hanya sekedar pendataan, dan tidak dilakukan perawatan atau yang bisa dijadikan objek wisata sejarah.

Perawatan, pengawasan dan pendataan tentang cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi karena tidak memiliki peraturan daerah tentang cagar budaya dan benda-benda bersejarah yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, hanya beracuan kepada peraturan bupati, dan program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi

terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Diperlukan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Penelitian ini meliputi pengetahuan cagar budaya dan wisata sejarah, agar dapat, melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. yang bisa dijadikan objek wisata, yang meningkatkan nasionalisme, nilai jual dan nilai saing terhadap daerah-daerah lain, dan bisa menjadikan identitas sebuah daerah, jangan sampai cagar budaya serta benda bersejarah dimiliki oleh pihak asing, masyarakat sering

meninggalkan pengetahuan tentang sejarah, dan budaya yang ada di daerah mereka sendiri, terkhususnya pemuda pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut:

**“STRATEGI KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DALAM PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan cagar budaya Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten, dalam mengembangkan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis, akademis, dan teoritis, sebagai berikut:

- a. Praktis: berikan masukan tentang bagaimana strategi jabatan pelancongan dan kebudayaan dalam membangun dan memelihara warisan kebudayaan, supaya ia dapat digunakan sebagai bahan untuk penilaian strategi untuk memperbaiki masa depan
- b. Akademik: sebagai input kepada apa yang berlaku dalam bidang berbanding dengan teori-teori yang digunakan sebagai asas untuk berfikir dalam konteks pembangunan sains, terutamanya pentadbiran awam.
- c. Teoretikal: kajian ini akan meningkatkan lagi pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajaran kedua-dua melalui penjelasan pensyarah dan dari buku teks yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Ali Faried (2011, hal 19) Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apa lagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan merupakan fenomena masyarakat yang masih muda, karena baru timbul suatu cabang dari pada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia. Handayani (1996, hal 2) berpendapat, administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat ketata usahaan
2. Sedangkan administrasi dalam arti luas, yaitu berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris), yang berarti administrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (kelompok) yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Ali Faried (2011, hal 19) Secara terminologi apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apa lagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan merupakan fenomena masyarakat yang masih muda, karena baru timbul suatu cabang dari pada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia. Handayani (1996, hal 2) berpendapat, administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat ketata usahaan
2. Sedangkan administrasi dalam arti luas, yaitu berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris), yang berarti administrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (kelompok) yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian diatas, menunjukkan bahwa administrasi merupakan proses yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan dari organisasi sedangkan manajemen merupakan proses yang akan merealisasikan dari tujuan yang ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Atmosudirdjo (1997, hal 17) mengemukakan bahwa administrasi dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu: sudut proses, sudut fungsional dan sudut institusional. Administrasi ditinjau dari sudut proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan, sampai proses pencapaian tujuan itu sendiri. Sedangkan ditinjau dari sudut fungsinya ialah bahwa di dalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan itu terdapat berbagai fungsi-fungsi atau tugas-tugas itu dimulai dari perencanaan, mengorganisasi, menggerakkan sampai pada tugas mengawasi atau mengendalikan. Selanjutnya ditinjau dari sudut institusional atau kelembagaan yaitu administrasi sebagai suatu totalitas kelembagaan. Didalam lembaga itu terdapat kegiatan untuk mencapai tujuan.

Sering dikatakan sebagai kiat administrasi sama usianya dengan peradaban manusia. Keberadaan ini dapat dibuktikan dengan menelaah unsur-unsur administrasi. Siagian (1985, hal 53) mengemukakan secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat lima unsur dari administrasi yaitu:

1. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pembeneran terkuat dari eksistensi administrasi adalah untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran. Hal menarik untuk diperhatikan ialah bahwa tujuan dan dsasaran yang

ingin dicapai, dapat merupakan tujuan bersama dari orang-orang yang terlibat dari pencapaiannya.

2. Dua orang atau lebih yang baik secara formal atau informal terikat secara bersama terlibat dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Adanya kegiatan yang harus diselenggarakan.
4. Keterlibatan bersama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
5. Alat kerja yakni berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ada kaitan langsung dengan tercapainya tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001, hal 38) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Lebih lanjut Sondang P. Siagian dalam H.M. Daryanto (2006, hal 7) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hadari Nawawi dalam Inu Kencana Syafii (2002, hal 5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi dikatakan mengandung serangkaian kegiatan sebagai salah satu unsurnya, hal itu berarti bahwa dalam menjalankan roda administrasi tidak mungkin dapat menemukan situasi dimana hanya terdapat satu kegiatan saja dan pelaksanaannya pun seketika yang setelah selesai tidak akan memerlukan kelanjutan atau kesinambungan lagi dan tidak mungkin dalam menjalankan roda administrasi tanpa sarana dan prasarana tertentu, memang tidak mungkin melakukan kategorisasi yang universal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan karena jumlah, bentuk dan jenisnya ditentukan oleh antara lain bentuk dan jenis rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, misalnya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu organisasi niaga yang menghasilkan dan memasarkan barang-barang elektronik akan lain dari sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu perusahaan yang melakukan pencaharian dan pengeboran minyak lepas pantai dan tentu berbeda pula dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan.

Tujuan menjalankan roda administrasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, artinya suatu organisasi diciptakan untuk mencapai

tujuan tertentu. Mudah memahami bahwa Negara sebagai bentuk organisasi paling besar dewasa ini diciptakan oleh suatu bangsa dengan bentuk pemerintahan tertentu yang menguasai satu wilayah tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan Negara. Negara itulah yang menentukan tujuan akhir yang hendak dicapai kemudian diterima dan diusahakan pencapaiannya oleh seluruh warga Negara dari generasi kegenerasi.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa manajemen adalah bagian dari administrasi seperti diatas dan adapula sebaliknya. Sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau Negara mana pendapat itu berasal dari Prajudi (1982, hal 32) dalam Inu Kencana Syafiie (2008, hal 5). Pada kesempatan lain para ahli administrasi pada umumnya sependapat bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen Siagian (1985, hal 7), dalam Inu Kencana Syafiie (2008, hal 5).

Slamet Wijadi Atmosudarmo dalam Syaiful Sagala (2000, hal 22) bahwa pengertian administrasi dapat ditinjau dari sudut institusional, yaitu administrasi keseluruhan orang atau kelompok orang-orang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama; sedangkan dari sudut fungsional yaitu segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, tindakan tersebut bersifat melihat kedepan”.

Sebagai komponen administrasi, manajemen dapat disoroti dari dua sudut pandang. Yang pertama ialah menyoroti manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai jenis aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan. Para

ahli telah merumuskan berbagai aktivitas tersebut dengan dua kategori utama, yaitu aktivitas yang tergolong sebagai fungsi-fungsi organik manajemen dengan berbagai cara, gaya dan istilah, dan fungsi – fungsi penunjang bagi fungsi – fungsi organik.

Sondang P. Siagian (2001, hal 30) bahwa administrasi dalam kamus bahasa Arab disebut juga sebagai yudabbiru, sedangkan dalam bahasa kamus prancis disebut dengan perkataan administer. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu administration dan kata sifat administrativus yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai administration”. Organisasi juga disebut sebagai komponen kedua dari administrasi. Seperti telah dimaklumi, organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya. Selanjutnya apabila suatu organisasi bergerak dalam kegiatan yang bagian-bagiannya menyelenggarakan aktivitas yang sangat spesialisik, seperti misalnya toko serba ada atau organisasi penelitian dan pengembangan, tipe organisasi yang sering dipandang cocok adalah organisasi fungsional.

Prajudin Atmosudirjo dalam Inu Kencana Syafii (2008 hal 4) bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi itu berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh John M Pfiffner dalam Syaiful Sagala (2000, hal 24) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan proses terutama mengenai cara-cara (alat-alat) sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi juga dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan materi untuk mencapai tujuan yang dikehendak.

Pentingnya peranan administrasi mengakibatkan timbulnya pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya abad sekarang ini merupakan abad administrasi, karena semua keputusan baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta berbagai bidang lainnya hanya akan ada artinya apabila keputusan tersebut terlaksana dengan efisien dan efektif.

Pelaksanaan berbagai keputusan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar utama keberadaan suatu sistem administrasi. Telah terlihat diatas bahwa administrasi sebagai proses kerja telah ada sejak dahulu kala karena administrasi timbul bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Apabila sejarah perkembangan dipelajari dengan seksama, akan terlihat bahwa dalam setiap tahap peradaban manusia, apapun tujuannya, bagaimanapun bentuknya, administrasi telah ada. Perkembangan administrasi dipengaruhi dinamika manusia dan masyarakat, sebaliknya dapat dipastikan bahwa dinamika manusia dan masyarakat dipengaruhi pula oleh praktik-praktik administrasi.

Charles A. Beard seorang sejarawan politik pada tahun 1937 pernah mengatakan dalam Sondang P. Siagian (2001, hal 6) bahwa tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi.

Kelangsungan pemerintah yang beradab bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung pada kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah modern.

2.1.1 Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi dapat ditentukan oleh para pendiri suatu organisasi, akan tetapi dapat pula oleh orang-orang yang bergabung kemudian terlibat dalam usaha pencapaiannya. Sesungguhnya tidak terlalu relevan untuk mempersoalkan siapa yang menentukan tujuan yang hendak dicapai. Hal mendasar ialah adanya tujuan tersebut karena apa yang terjadi kemudian dalam proses administrasi dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Sesungguhnya tujuan jangka panjang tidak di tentukan oleh para anggota organisasi yang bergabung melainkan oleh para pelopor atau pendiri organisasi yang bersangkutan. Misalnya, tujuan akhir suatu Negara biasanya ditentukan oleh para pendiri Negara tersebut. Tujuan jangka panjang suatu organisasi niagapun ditentukan oleh para pendiri atau pemilik pertamanya yang kemudian ditentukan oleh para anggota organisasi adalah berbagai sasaran, baik sasaran jangka sedang. Pernyataan ini tentunya tidak berarti bahwa tujuan jangka panjang yang berupa tujuan akhir tidak mungkin mengalami perubahan. Perubahan mungkin saja terjadi karena berbagai faktor, baik yang sifatnya internal maupun eksternal yang dihadapi oleh organisasi dalam perjalanannya. Mengenai tugas-tugas operasional sebagai unsur administrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya akan lebih

berdaya guna dan berhasil guna apabila semua orang yang terlibat maupun menumbuhkan dan memelihara kerja sama yang erat antara mereka.

Kiranya tidak akan berlebihan apabila dalam membahas teori administrasi pentingnya tujuan selalu mendapat penekanan kuat. Tidak berlebihan karena seperti telah sering dikemukakan oleh para teoritis dan juga sangat disadari oleh para praktisi, setiap organisasi diciptakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Pada mulanya tujuan itu ditentukan oleh para pendiri organisasi untuk kemudian diusahakan pencapaiannya oleh seluruh anggota organisasi secara berkesinambungan. Bahkan alasan utama keberadaan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah selanjutnya dalam proses administrasi ditempuh adalah demi tercapainya tujuan itu pula.

Administrasi perkantoran berfungsi untuk membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Administrasi juga mempunyai fungsi teknis yaitu membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam departemen teknologi informasi.

Sergiovanni dan Carver (dalam H.M Daryanto (2006, hal 17) mengatakan bahwa ada empat tujuan administrasi yaitu : efektivitas kerja, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness), dan kepuasan kerja. Keempat

tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan suatu keberhasilan penyelenggaraan.

Efektivitas kerja adalah hasil-hasil yang dicapai oleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam periode tertentu. Sebagai perbandingan hasil ini, dapat berupa rencana, kebijaksanaan dan sarana-sarana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kriteria penilaian efektivitas kerja tidak saja menyangkut dalam gejala-gejala dalam lingkup organisasi itu sendiri atau hasil-hasil materil tapi berlaku untuk semua sasaran baik itu diluar organisasi atau yang non material.

Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan input yang direncanakan dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi.

Kemampuan menyesuaikan diri adalah mampu menyesuaikan diri dengan siapa saja dan mampu dalam berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga faktor lain dapat berpengaruh dalam kesiapan memasuki dunia kerja seperti kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan.

Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individual mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda – beda. Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Bambang Istianto (2005, hal 8) bahwa Kepuasan kerja sebagai efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relative puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya.

2.2 Konsep Perilaku Organisasi

Teori atau ilmu perilaku organisasi (organization behavior) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi, Handoko (2000, hal 35). Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek- aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya *Organizational Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak, Wexley and Gary. A (2005, hal 27). Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan.

Stephen Robins (2007, hal 9). Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tiga pendekatan perilaku yakni perorangan, kelompok dan struktur. Dari pernyataan di atas, perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai apa yang dilakukan orang-

orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku yang mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut.

Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun dan dikontribusikan dari sejumlah bidang perilaku disiplin. Bidang-bidang tersebut adalah Psikologi, Sosiologi, Psikologi Sosial, Antropologi. Kontribusi Psikologi terutama pada tingkat individu atau mikro. Ketiga disiplin yang lain berkontribusi pemahaman terhadap makro.

Organisasi dalam pandangan beberapa pakar seolah-olah menjadi suatu “binatang” yang berwujud banyak, namun tetap memiliki kesamaan konseptual. Atau dengan kata lain, rumusan mengenai organisasi sangat tergantung kepada konteks dan perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut, Wexley and Gary. A (2005, hal 35). Dari beberapa definisi atau pembatasan mengenai organisasi ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Organisasi merupakan suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka praktek-praktek dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktek mereka.
3. Organisasi dapat didefinisikan sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi.

4. Organisasi adalah suatu sistem dari aktivita-aktivita orang yang terkoordinasikan secara sadar, atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih.
5. Organisasi adalah lembaga sosial dengan ciri-ciri khusus : secara sadar dibentuk pada suatu waktu tertentu, para pendirinya mencanangkan tujuan yang biasanya digunakan sebagai simbol legitimasi, hubungan antara anggotanya dan sumber kekuasaan formal ditentukan secara relatif jelas walaupun seringkali pokok pembicaraan dan perencanaan diubah oleh para anggota-anggotanya yang membutuhkan koordinasi atau pengawasan.
6. Organisasi adalah suatu kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
7. Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.
8. Organisasi merupakan suatu alat untuk pencapaian tujuan dari orang-orang yang berada diluar organisasi tersebut, sebagai suatu alat untuk pencapaian tujuan. Untuk itu organisasi harus dibuat rasional dalam arti kata harus disusun dan beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan formal dan perhitungan-perhitungan efisiensi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi sesungguhnya merupakan kumpulan manusia yang diintegrasikan dalam suatu wadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan.

Winardi (2003, hal 20) menyatakan bahwa, organisasi tidak hanya diartikan sebagai wujud saja tetapi juga sebagai proses interaksi berbagai pihak. Kontrak atau perjanjian yang membentuk organisasi ini sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Spot Contract, Yaitu kontrak yang terjadi karena adanya transaksi dadakan (spot transaction). Kontrak jenis ini bersifat tidak fleksibel (inflexible) dalam pengertian bahwa para pihak yang mengadakan kontrak tadi tidak memiliki kebebasan untuk saling mengajukan penawaran. Termasuk dalam jenis kontrak ini adalah belanja di supermarket, ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, menonton sepakbola di stadion, dan sebagainya.
2. Relational Contract, Yaitu kontrak yang terjadi dari adanya hubungan atau relasi antar dua orang atau lebih. Kontrak jenis ini lebih fleksibel sifatnya karena memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, kontrak ini mengenal adanya clausul escape atau klausul yang berhubungan dengan diadakannya kontrak tersebut. Contohnya adalah pengangkatan seorang pekerja dengan terlebih dahulu membuat kontraknya, pegawai negeri yang tunduk pada aturan tentang hak dan kewajiban pegawai, dan sebagainya. Khususnya mengenai posisi pegawai negeri ini dilihat dari ketidakbebasan untuk menentukan pilihan

sesungguhnya bisa dikelompokkan kedalam spot contract. Namun karena sifat relasionalnya yang lebih kuat dan proses untuk menjadi pegawai juga panjang (tidak bersifat dadakan), maka ini lebih tepat dikelompokkan dalam relational contract.

3. *Implicite Contract*, merupakan jenis kontrak yang paling fleksibel, dimana tanpa adanya ikatan kontrak secara formal, seseorang dapat menjadi anggota suatu organisasi. Seorang warga negara misalnya, tanpa melakukan sesuatu tindakan telah melekat dalam dirinya perasaan bangga sebagai anggota masyarakat serta memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap negaranya. Kelemahan dari kontrak implisit ini adalah sifatnya yang tidak lengkap (*incomplete*) dan susah terukur, sehingga ada baiknya jika diadakan *clausul escape*.

2.3 Pengertian dan Fungsi Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan, Samsudin (2006, hal 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2001, hal 3) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Selanjutnya Gitosudarmo dalam Nurman (2015, hal 2) menyatakan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu proses.
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan
3. Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (science).

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, defenisi yang diberikan oleh para ahli memiliki perbedaan untuk memperlihatkan warna defenisi diantara ketiga defenisi diatas. Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang dan mngawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut pengertian kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Sedangkan pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni (art) atau suatu ilmu pengetahuan (Science) yang dapat dipelajari dan dapat diajarkan kepada orang lain.

Menurut para ahli manajemen itu sendiri berkaitan erat dengan style, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upayanya

untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Handyaningrat (1996, hal 10) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling) Handoko (1999, hal 8).

Johnson dalam Abdul Choliq (2011, hal 2) sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Abdul Choliq (2011, hal 3).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,

mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Defenisi manajemen tersebut lebih menitik-beratkan pada usaha menggunakan/memanfaatkan sumber yang tersedia atau yang berpotensi dalam pencapaian tujuan. Adapun sumber-sumber tersebut adalah orang, uang, material, peralatan, (mesia), metode, waktu dan prasarana lainnya.

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian(organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai”, Abdul Choliq (2011, hal 36).

Newman dalam Handayani (1996, hal 12) fungsi manajemen terdiri dari:

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)

3. Pengumpulan Sumber (Assembling Resources)
4. Pengendalian Kerja (Supervising)
5. Pengawasan (Controlling)

Namun yang lebih dikenal dan biasa digunakan oleh organisasi adalah fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam Winardi (2010, hal 4) yang menyatakan bahwa Fungsi manajemen terdiri dari P.O.A.C.

1. Planning (Perencanaan);
2. Organizing (Pengorganisasian);
3. Actuating (Menggerakkan);
4. Controlling (Pengawasan);

Dari pendapat fungsi manajemen di atas, secara keseluruhan menempatkan perencanaan (planning) pada urutan paling atas, dengan demikian para ahli menempatkan perencanaan hal paling penting dalam fungsi manajemen.

Secara umum dijelaskan ke-empat fungsi manajemen tersebut:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman kearah mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ini dapat dikurangi ketidakpastian, lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan, dan lebih memudahkan dalam pengawasan. Perencanaan ini (planning) termasuk menentukan tujuan, streategi yang akan digunakan, dan mengembangkan perencanaan tersebut untuk koordinasi kegiatan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberi tugas, menjalankan misi. Karena terbatasnya kemampuan seseorang dan meningkatnya volume pekerjaan dalam suatu perusahaan yang berkembang, perlu adanya pembagian pekerjaan agar diperoleh hasil yang optimal. Dengan adanya pembagian pekerjaan itu, maka muncullah bagian-bagian di dalam perusahaan.

3. Menggerakkan (Actuating)

Tindakan menggerakkan (actuating) mencakup motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan menginisiasi dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Maka, dengan sendirinya tindakan menggerakkan (actuating) harus dikaitkan secara erat dengan fungsi-fungsi lainnya seperti misalnya: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai seperti yang diinginkan.

4. Pengawasan (Controlling)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Proses pengawasan mencatat perkembangan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya, untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat.

2.4 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *Leadership* dan dalam bahasa Arab disebut *Zi'amah* atau *Imamah*. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan para pakar:

- a. Kootz & O'donnel (1984), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
- b. Georger R. Terry (1960), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- c. Slamet (2002), kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- d. Thoha (1983), kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat para pakar di atas penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing dan

memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

1. Prinsip- Prinsip Kepemimpinan

Menurut Bernes dalam buku Prilaku Dalam Keorganisasian mengatakan seorang pemimpin dalam tim kaizen memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia baru kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan kaizen menurut Bernez dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu:

- a. Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka kita pengalihan perhatian pada suatu yang baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas, keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya.
- b. Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama secepatnya dapat mewujudkan kemampuan.
- c. Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar.

- d. Menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen tim adalah bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi kerja dan peningkatannya.
- e. Memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi kaizen tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi yang terjadi dalam perusahaan secara murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling menyalahkan.
- f. Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat individual yang terpenting bisa tetap terjaga.
- g. Memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan kaizen. mengakui bahwa karyawan tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi tugas sehari-hari mereka. Sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan, siklus kaizen atau siklus kualitas tim-tim proyek.
- h. Memberikan wewenang pada setiap karyawan. Melalui pelatihan berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reputasi perusahaan, dan penghargaan, maka para karyawan kaizen memilih kekuatan untuk cara memengaruhi urusan diri mereka sendiri dan urusan perusahaan.

2. Kriteria Seorang Pemimpin

Menurut Vietzal Rivai dan Boy Raffi Amar dalam buku pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi mengatakan Seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati kriteria tersebut, yaitu;

- a. Pengaruh; seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin.
- b. Kekuasaan/power; seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin, tanpa itu ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan.
- c. Wewenang; wewenang disini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal/ kebijakan. Wewenang disini juga dapat dialihkan kepada karyawan oleh pimpinan apabila pemimpin percaya bahwa

karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga karyawan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari segi sang pemimpin.

- d. Pengikut; seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan / *power* dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan mengikuti apa yang dikatakan pemimpin.

3. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Menurut George R Terry dalam buku Manajemen sumber daya manusia mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan, sifat-sifat tersebut adalah;

- a. Energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin.
- b. Memiliki stabilitas emosi

Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari purbasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya.

- c. Motivasi pribadi

Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam

keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya.

d. Kemahiran mengadakan komunikasi

Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama.

e. Kecakapan mengajar

Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya.

f. Kecakapan social

Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinan.

2.5 Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya (Ruslan, 2007:37). Menurut Porter (Rangkuti, 2004:4) strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Senada dengan itu, Hamel dan Phalarad (Rangkuti, 2004:4) juga mengatakan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.

Karl von Clausewitz (Cangara, 2011:236) merumuskan strategi adalah suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Sementara itu menurut Marthin-Anderson menjelaskan bahwa strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.

Strategi secara umum adalah istilah yang sering diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Istilah strategi diterapkan untuk berbagai lapisan masyarakat atau organisasi (level pelaksana sampai pimpinan puncak organisasi) Dari pengertian itu, strategi mempunyai lima ciri-ciri, sebagai berikut :

1. Pemusatan perhatian kepada kekuatan sebagai pendekatan strategis.
2. Memusatkan perhatian kepada analisis dinamik, analisis gerak (operasional) dan analisis aksi (pelaksanaan).

3. Strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai dan gerak untuk mencapai tujuan.
4. Strategi memperhitungkan factor-faktor waktu (sejarah, masa lampau, masa kini, masa depan dan factor lingkungan).

Strategi berusaha mengidentifikasi masalah yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, kemudian mengadakan analisis tentang kemungkinan-kemungkinan dan memperhitungkan pilihan-pilihan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) merancang strategi itu baik dalam dua bidang. Di kawasan pertama, perancangan strategik membuat gambaran jelas tentang arah yang akan diketengahkan (visi) dan apakah matlamatnya, dan sebab kewujudan organisasi, dalam gambaran ini mengembangkan matlamat yang akhirnya dapat diukur, dan sejauh mana organisasi mendekati visi dan tujuan utamanya atau bahkan jauh dari itu. Di kawasan kedua, perancangan strategik bertujuan untuk mendedahkan realiti yang wujud, dalam skop kerja sebuah organisasi.

Ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama lingkup eksternal dimana wilayah yang pihak lain mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi lain. Lingkup yang kedua adalah lingkup internal, yang terdiri dari atas sumber daya, kekuatan, berbagai kemungkinan serta tuntutan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategi harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas serta tujuan akhir mereka. Setelah

memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuannya. Dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya. Ada 4 kombinasi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Strategi kekuatan-kemungkinan, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan berbagai kemungkinan.
2. Strategi kekuatan-ancaman, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.
3. Strategi kelemahan-kemungkinan, artinya sejauh mana kelemahan dapat diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan pengembangannya.
4. Strategi Kelemahan-kemungkinan, artinya bagaimana kelemahan dapat diatasi, untuk mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

2.6 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam ungkapan Visi di atas, terkandung makna :

1. Negeri Berbudaya yakni negeri yang masyarakatnya mengetahui dan memahami nilai-nilai budaya daerah dan mempedomani norma-norma adat istiadat yang berlaku secara turun temurun yang merupakan warisan dari nenek moyang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Daerah Tujuan Wisata, yakni destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum pasilitas pariwisata aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (UU RI No 10 Thn 2009).
3. Pemuda yakni tergali.
4. Olahraga yang berprestasi yakni bersaing di Indonesia.
5. Dengan kedatangan wisatawan diharapkan terbukanya peluang ekonomi /kesempatan kerja bagi masyarakat, serta adanya peningkatan penerimaan daerah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi.
6. Pengembangan objek Pariwisata tidak boleh bertentangan dengan Agama dan Budaya

Misi DIPARBUD Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM di bidang kepariwisataan yang dapat mengelola potensi budaya, kesenian dan alam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata domestik maupun manca negara.
2. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.
3. Mempromosikan secara luas tentang Kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.

4. Menyusun dan memberlakukan regulasi tentang pengusaha bidang kepariwisataan dalam rangka pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

2.6.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan akan menggambarkan strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, menggambarkan isue strategik, memberikan arah dalam perumusan sasaran, kebijakan dan program, serta menjadikan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Mewujudkan Kuantan Singingi menjadi daerah tujuan wisata.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kuantan Singingi
3. Meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi melalui bidang Kepariwisataan.

2.6.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yakni sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan. Atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu, yang akan disajikan secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.

Penetapan sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, rinci, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam konteks rasionalitas.

Adapun sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataaan, Event Pariwisata dan Objek Wisata di Kuantan Singingi serta tersedianya sarana Promosi Kepariwisataaan yang kontinue dan terkoordinir secara baik serta mudah diakses / diterima oleh pelaku pariwisata.
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi .
3. Meningkatnya Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.6.3 Kebijakan

Kebijakan disini adalah pedoman/rambu sumber pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Implementasi dari kebijakan yang ditetapkan Bupati Kuantan Singingi kedalam kebijakan intern Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Membina dan melestarikan Seni Budaya Tradisional Kuantan Singingi untuk dikembangkan menjadi event pariwisata.
2. Membina dan mendayagunakan komponen terkait dibidang Kepariwisata.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas objek wisata.
4. Melaksanakan kegiatan Promosi dan Dokumentasi Kepariwisata Kuantan Singingi.
5. Menyusun dan memberlakukan Regulasi tentang Pengusahaan Bidang Kepariwisata dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

2.6.4 Program

Program disini adalah kegiatan-kegiatan nyata yang bersifat sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program kerja operasional merupakan upaya untuk

mengimplementasikan strategi organisasi, suatu proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD yang menyangkut kewenangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Program Kerja operasional dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan SDM di bidang Kepariwisataaan
2. Pengembangan nilai-nilai budaya tradisional Kuantan Singingi
3. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah
4. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi
6. Promosi dan dokumentasi
7. Penyusunan produk hukum daerah tentang Pajak dan Restribusi kepariwisataaan

2.6.5 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009

Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bagian ke tiga bidang kebudayaan pasal 11 nomor tiga poin a, b, c, d, e,yaitu, Kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi.:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan, pengajiaan sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian.

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional kesenian.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian.
- d. Pengkoordinasian pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional kesenian.
- e. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional dan kesenian.

Selain itu diperkuat oleh peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bidang kebudayaan pasal 13 tentang tugas seksi pengembangan kebudayaan poin a, b, c, d, e, f, g, h, i adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data pengembangan kebudayaan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengembangan kebudayaan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengembangan kebudayaan.
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana pengembangan kebudayaan.
- e. Menyiapkan bahan telaahan pengembangan kebudayaan.

- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengembangan.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kebudayaan.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan kebudayaan.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi pengembangan kebudayaan.

Serta di dalam pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pasal 14 paragraf dua nomor satu, dua, tiga, dan poin a, b, c, d, e, f, g, yang berbunyi:

1. Seksi Pengkajian Sejarah, museum dan nilai tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Seksi Pengkajian Sejarah, Museum dan Nilai Tradisional mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis. Perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan kegiatan pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
3. Seksi Pengkajian Sejarah ,museum dan nilai tradisional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian sejarah ,museum dan nilai tradisional.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengkajian sejarah, museum, dan nilai tradisional.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pengkajian sejarah,museum,dan nilai tradisional.
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian sejarah,museum dan nilai tradisional.
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervise dan fasilitas pengelolaan pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- f. Penyiapan bahan pembinaan,pengawasan evaluasi,pengkajian sejarah,museum dan nilai tradisional.
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengkajian sejarah, museum, dan nilai tradisional.

Terdapat rincian tugas seksi pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional menurut peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pasal 15 yang berbunyi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, dokumentasi, identifikasi,pengelolaan dan penyajian data pengkajian sejarah,museum dan nilai tradisional.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengkajian sejarah,museum dan nilai tradisional.

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- e. Menyiapkan bahan telaahan pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional.

2.7 Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah aspek yg sangat luas yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat atau bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. serta pelestarian dan pengembangan budaya dan memiliki nilai yang mendatangkan ekonomi sebagai tempat wisata bagi masyarakat dan menunjang perekonomian masyarakat serta kebudayaan sebagai khazanah sejarah suatu bangsa/masyarakat yang tercermin dalam pengakuan/kesaksiannya dan nilai-nilainya, yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan ideal dan makna rohaniah yang dalam, bebas dari kontradiksi ruang dan waktusekitar. agar dapat terwujudnya

Tujuan Wisata, yang Berbudaya, yang menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah.

Menurut Dr. Moh Hatta berpendapat Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Menurut Djodigono (1958) kebudayaan dengan mengatakan kebudayaan itu adalah daya dari budi, yang berupa cipta, karsa dan rasa.

Menurut Nostrand (1989: 51) mendefinisikan budaya sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut.

Menurut Larson dan Smalley (1972: 39) kebudayaan sebagai "blue print" yang memandu perilaku orang dalam suatu komunitas dan diinkubasi dalam kehidupan keluarga. Ini mengatur perilaku kita dalam kelompok, membuat kita peka terhadap masalah status, dan membantu kita mengetahui apa tanggung jawab kita adalah untuk grup. Budaya yang berbeda struktur yang mendasari yang membuat bulat bulat masyarakat dan komunitas persegi persegi.

Menurut Ralph Linton (1945: 30) kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan regular tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup name of ITU yaitu masyarakat yang dianggap lebih diinginkan dibuat tinggi atau lebih.

Menurut Bounded et.al kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Koentjoroningrat (1985: 180) kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

2.8 Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

2.9 Pengertian Pariwisata

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pariwisata yang menjadi rekomendasi oleh Islam

adalah pariwisata yang berhubungan dengan spritualitas, berziarah, dan perkunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam, perkunjungan tentang kebesaran ciptaan Tuhan, seperti pemandangan alam, gunung berapi, danau dan sejenisnya.

Perencanaan Pariwisata di Tingkat Kabupaten/Kota (PPK). PPK merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata wilayah kabupaten/kota. Fokus pada kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten/kota yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di wilayah kabupaten/kota rencana struktur tata ruang pariwisata kabupaten/kota yang mencakup jaringan transportasi antar dan intra kabupaten/kota sampai ke objek-objek utama penentuan kawasan pintu gerbang menuju ke objek utama dan kebutuhan akan fasilitas pendukung (jumlah, jenis, kelas dan lokasi) dan rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan, dan lokasi objek-objek menarik lainnya. Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka PPD lebih diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Daerah tujuan wisata, yakni destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, pasilitas umum pasilitas pariwisata aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (UU RI No 10 Thn 2009).

Dengan kedatangan wisatawan diharapkan terbukanya peluang ekonomi/kesempatan kerja bagi masyarakat, serta adanya peningkatan penerimaan daerah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. Pengembangan objek pariwisata tidak boleh bertentangan dengan agama

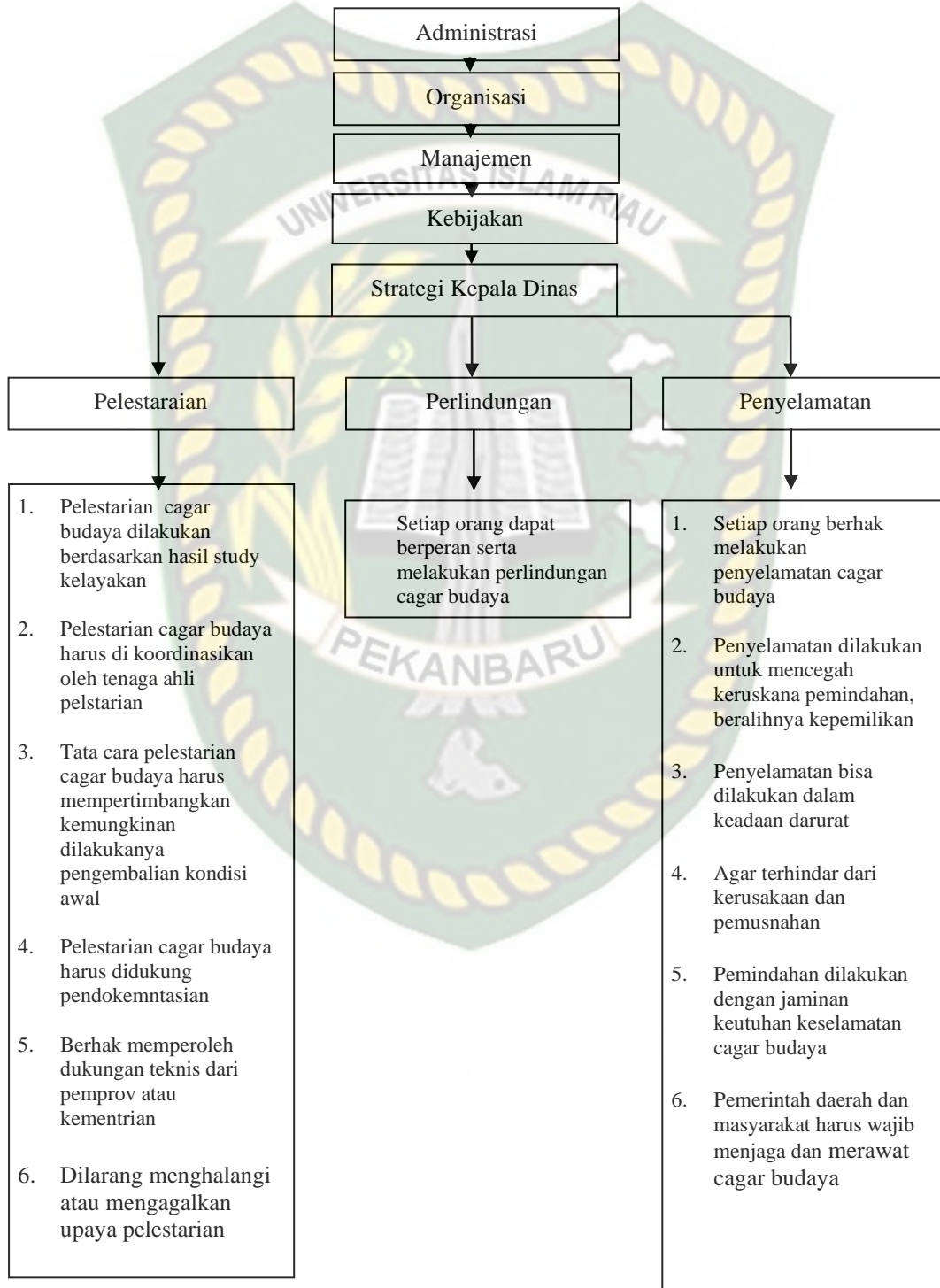
dan budaya menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan. Mempromosikan secara luas tentang kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional. Menyusun dan memberlakukan regulasi tentang pengusaha bidang Kepariwisata dalam rangka pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Menurut A.Yoeti (1992:8) adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. A.Yoeti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "Tour".

Menurut H.Kodhyat (1983:4) adalah sebagai berikut: Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

2.10 Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini, berikut akan di paparkan paradigma atau model penelitian dalam bagan berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian

2.11 Konsep Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang ada pada penelitian ini. Maka dirumuskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam teknik pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang diintegrasikan dalam suatu wadah kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan.
- c. Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- d. Kebijakan Publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.
- e. Impelentasi Kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga

pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

- f. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.
- g. Strategi pengembangan cagar budaya adalah strategi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan, melindungi, menyelamatkan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

2.12 Operasional Variabel

Untuk mendapatkan penelitian yang sempurna, variabel penelitian diperlukan agar pengambilan dan pembahasan data terarah. Sebagai parameter dari variabel yang diteliti akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan	Strategi Pengembangan Cagar Budaya	1. Pelestarian	A. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administrative.	Sangat Setuju, Setuju,

			<p>B. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.</p> <p>C. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.</p> <p>D. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya</p>	Tidak Setuju.
		<p>2. Perlindungan</p> <p>3. Penyelamatan</p>	<p>E. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.</p> <p>F. Setiap orang dilarang dengan sengaja menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian cagar budaya</p> <p>A. Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya</p> <p>A. Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya penyelamatan.</p> <p>B. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:</p>	

		<p>1. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan</p> <p>2. Mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>C. Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.</p> <p>D. Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.</p>	
		<p>E. Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.</p> <p>F. Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru</p>	

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis kajian ini adalah penyelidikan kualitatif, di mana penyelidikan kualitatif adalah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata bertulis atau lisan dari orang dan berkelakuan secara diam-diam di latar belakang dan seluruh individu (Sugiyono, 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kuantan Singingi, karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu Lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara dan merawat infrastruktur tempat pariwisata, cagar-cagar budaya serta benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. dan menegakkan Perbup tentang Kebudayaan dan tempat Pariwisata. Serta beberapa kecamatan dan Desa yang memiliki peninggalan benda bersejarah, cagar budaya dan Tempat Pariwisata.

3.3 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada bulan Januari sampai Agustus dalam upaya pengumpulan data-data dan fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif atau kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono: 2010:11).

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam merawat infrastruktur tempat pariwisata, cagar-cagar budaya serta benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam merawat infrastruktur tempat pariwisata, cagar-cagar budaya serta benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang akan di jadikan objek penelitian. Data tersebut diperoleh melalui data hasil observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yang mencakup:

1. Sejarah singkat berdirinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Jumlah tempat pariwisata, cagar-cagar budaya serta benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil (Sugiono : 2011: 157). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara bertanya langsung kepada responden penelitian.

3.5.2 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpuln data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur ((Sugiono : 2011: 162). Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana kuesioner disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda checklist.

3.5.3 Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono : 2011: 165). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penelitian berhadapan langsung dengan perilaku manusia serta perlu pengamatan secara langsung.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang tersimpan pada lokasi penelitian

3.5.5 Kepustakaan

Kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan bahan-bahan bacaan literatur, buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2010: 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kuantan Singingi. Dan tokoh masyarakat kabupaten kuantan singingi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 91). Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 96). Adapun sampelnya sebagai berikut.

1. Masyarakat Setempat

Penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2013: 97). Dalam proses penelitian penulis menemukan beberapa Masyarakat yang dijadikan sampel atau responden dalam penelitian.

Tabel 3.1. Sampel Penelitian

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi	5
2.	Dewan Kesenian Cabang Kecamatan Se Kabupaten Kuantan Singingi	15
3.	Masyarakat sekitar cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi	6
Total		26

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Thn 2010 Tentang Cagar Budaya. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan singingi. Pada Penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptip analisis yaitu teknik penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono: 2011:11).

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, sehingga apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali.

Analisis data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Setelah informasi dianggap cukup maka langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan katagori yang disiapkan dalam daftar kuesioner dan wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun pendapat yang disinggung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumusan persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran yang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003: 43) cara sebagai berikut:

Sangat Tercapai/Maksimal	: 76 - 100%
Tercapai/Kurang Maksimal	: 56 - 75%
Kurang Tercapai/Tidak Maksimal	: 40- 55%
Tidak Tercapai/Sangat Tidak Maksimal	: 0 – 39%

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan rumus diatas maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulannya dengan baik yaitu pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada masa lampau dan secara faktual, lebih merupakan kawasan kultural dan tradisi yang homogen. Penduduk kawasan ini terkenal sebagai komunitas masyarakat yang sangat menghargai keotonomian, demokrasi (musyawarah), serta memiliki sistem dan struktur pemerintahan yang mampu mengakomodasikan nilai – nilai dan kebutuhan masyarakatnya. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi dimaksudkan menguraikan kehidupan masyarakatnya yang diatur oleh adat sebagai subsistem kehidupan sosial yang mengalami proses dari masa lampau sampai masa kini dan prospeknya pada masa depan. Dalam uraian ini akan dipergunakan periodesasi: masa kuno, masa penjajahan, masa kemerdekaan.

4.1.1 Masa Kuno

Masa kuno dimaksudkan menjelaskan berdasarkan sumber – sumber sejarah yang sah, terpercaya tentang asal usul dan perkembangan serta keberadaan adat masyarakat yang mendiami wilayah kuantan singingi sejak mereka bermukim dari abad 7 – 16 Masehi dengan sistem kerajaan sampai masuknya pengaruh asing. Pada masa kuno ini telah berdiri suatu kerajaan bernama kandis yang beribu dikota dikandis, wilayah kuantan mudik sekarang, dan pada masa tertentu ibu kota pindah ke sintuo diseberang teluk kuantan sejak itu kerajaan diberi nama kuantan. Pada masa mula kandis masyarakat mendapat

pengaruh hindu. Pada masa sriwijaya sebagai kerajaan yang menjadi pusat agama budha. Pada masa itu wilayah kuantan meliputi wilayah yang dialiri batang kuantan, yaitu dari hulu Lubuk Ambacang sampai ke Pesikian Cerenti. Bukti – bukti tentang peninggalan tersebut dapat disaksikan, yaitu padang candi dilubuk ambacang dan cerenti, dan beberapa peninggalan sejarah lainnya, seperti meriam, tulisan sangsekerta dibatu, serta batu bangunan candi tersebut.

4.1.2 Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan belanda baru berhasil menguasai kuantan sejak 1905. Masuknya belanda ke kuantan, masyarakat kuantan dipekerjakan sebagai romusa, untuk membangun rel kereta api sumbar-riau dari sijunjung sampai logas, banyak masyarakat kuantan menjadi korban dan dikenal sebagai manusia logas tangko, masuknya belanda dihadapi dengan perlawanan oleh masyarakat seperti terkenal perang manggis. Akibat kekalahan kuantan menghadapi belanda dipaksakan *Korte verklaring* kepada Kuantan dibawah pimpinan raja hasan yang ditanda tangani tanggal 21 oktober 1905 dan 14 februari 1907 raja begab mendatangi *verklaring* tersebut. Akibat kedatangan *verklaring* itu raja dan pemuka adat tidak mempunyai wewenang lagi, tetapi dijadikan belanda sebagai pembantu *kontoreleur* atau demang di teluk kuantan. Para datuk yang mendukung belanda diberi kewenangan sebagai pemungut emas mannah, pancung alas dan lain – lain.

4.1.3 Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan kuantan singingi menjadi suatu kewedanaan dengan ibu kota kewedanaan dengan ibu kota kewedanaan diteluk kuantan. Kewedanaan ini bagian dari Kabupaten Indragiri. Pemerintahan kewedanaan ini mengembalikan kewenangan para datuk dan orang godang sebagaimana sebelum pemerintahan belanda. Diberinya kewenangan itu maka pemerintahan dipimpin oleh kepala negeri (berpusat dikoto) dan dipanggilkan wali negeri dan wali negeri berada dibawah kewenangan asisten wedana. Kuantan singingi dibagi menjadi daerah. Asisten wedana kuantan mudik di lubuk jambi, asisten wedana kuantan hilir dan cerenti. Serta singingi. Pada masing – masing daerah asisten wedana terdapat pula orang godang yang dikoordinir oleh datuk bisai di teluk kuantan.

Dari kenyataan ini terlihat bahwa pemuka adat mendapat peranan dalam pemerintahan. Sejak keluarnya UU No. 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah dan diubah dengan UU No. 5 Tahun 1974. Tentang pemerintahan di daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, undang – undang tersebut telah menyeragamkan pemerintahan diseluruh indoneisia tanpa memperhitungkan cirri – cirri khusus masing – masing daerah, maka peranan pemuka adat makin berkurang di pemerintahan. Begitu era kemerdekaan mulai bergerak maka pemegang teraju negeri berpindah dari pemangku adat kepada wali negeri. Sedangkan jabatan orang godang tidak berlaku lagi dalam tata pemerintahan Republik Indoneisia. Tetapi sunguhpun demikian, para datuk yang pernah memegang teraju luhak dan kenegerian, masih tetap mempertahankan gelarnya. Dengan demikian lembaga adat masih tetap berdiri, hanya kekuasaanya

dalam pemerintahan yang sudah hilang. Semenjak era kemerdekaan sampai sekarang jabatan Pemangku adat hanya berlaku terhadap suku – suku yang berada di kuantan singingi dan tidak termasuk didalam stuktur pemerintahan. Dan sekarang kabupaten kuantan singing yang terdiri 15 kecamatan setiap kecamatan memiliki cagar budaya dan benda bersejarah yang kuat untuk menjadi identitas sebuah daerah tersebut.

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas daratan rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3°-15° diatas permukaan laut.

2. Geologi

Secara Struktural Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

3. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C-36,5° dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C-22,0°C, Curah hujan antara 229,00-1.133,0mm per tahun dengan keadaan musim berkisar: Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari dan Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

4. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

5. Potensi Daerah

Sebagai daerah dataran rendah, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi daerah sebagai daerah perkebunan, peternakan, hasil hutan, pertambangan, dan dibidang industri. Beberapa Bidang yang Potensial untuk Investasi :

- a. Pembangkit listrik dengan kapasitas kecil
- b. Pengembangan kesuburan tanaman
- c. Pengolahan air bersih
- d. Pengembangan infrastruktur transportasi
- e. Pariwisata alam dan budaya

4.2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 04 Tahun 2008 tentang tata kerja dan susunan organisasi, kedudukan dan tugas Dinas –

Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala DISBUDPARPORA
- b. Sekretariat, membawakan :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kebudayaan Membawakan :
 1. Seksi Pengembangan Kebudayaan
 2. Seksi Pengkajian Sejarah, Museum dan Nilai Tradisional
 3. Seksi Kesenian
- d. Bidang Pariwisata Membawakan :
 1. Seksi Pengembangan Objek dan Aktivitas Wisata
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga Membawakan :
 1. Seksi Pembinaan Generasi muda
 2. Seksi Pembinaan Olahraga
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Merupakan bagan yang dibuat berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan SKPD terkait.

Sesuai dengan peraturan No 04 Tahun 2008 diatur juga kedudukan DISBUDPARPORA dimana dalam hal ini yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala DISBUDPARPORA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kepala Dinas Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala DISBUDPARPORA menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun renstra dan akuntabilitas kinerja
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis lingkugan dinas
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga baik bersifat administrative maupun teknis.
- d. Melaksanakan pembinaan produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta usaha dan investasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan kelestarian sumber daya kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

- g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia baik aparatur maupun pelaku usaha dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
- h. Melaksanakan koordinasi dengan dinas / instansi dalam rangka pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan monitoring, valuasi dan pelaporan dilingkup kegiatan dinas
- j. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait pelaksanaanya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatatlaksana dan keamanan. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kpala Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pelayanan secretariat.
2. Perumusan kebijakan koordinasi penyusun program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu.
3. Perumusan kebijakan pelayanan administrative dinas.
4. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga dinas.

5. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalkasanaan serta hubungan masyarakat.
6. Menginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecah masalah.
7. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai.
8. Perumusan kebijakan administrasi keuangan.
9. Perumusan kebijakan pengelolaan kebijaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
10. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas.
11. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dinas.
12. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
13. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan
14. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja / instansi / lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
15. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
16. Pelaksana tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Program.
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan

17. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

3. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan riset strategi kebudayaan.
- b. Pelaksanaan riset strategis kebudayaan dibidang budaya daerah, seni daerah, sejarah kebudayaan, dinamika, sumber daya, dan ekonomi sumber daya.
- c. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidangnya

Bidang kebudayaan terdiri dari:

1. Seksi pengembangan kebudayaan
2. Seksi pengkajian sejarah, museum dan nilai Tradisional.
3. Seksi kesenian

4. Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan teknis dibidang pengawasan, pengembangan, aktivitas, sarana dan prsarana objek wisata.
- b. Pelaksanaan pengawasan promosi dan pemasaran objek wisata.

- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pengawsan
- d. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawsan terhadap pelkasaan tugas bawahan.
- e. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinassesuai dengan bidangnya.

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- 1. Seksi pengembangan objek dan aktivitas wisata
- 2. Seksi promosi dan pemasaran wisata
- 3. Seksi sarana dan prsarana wisata

5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang pembinaan generasi muda, olahraga, sarana dan prasarana.
- b. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawsan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidangnya

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- 1. Seksi pembinaan generasi muda
- 2. Seksi pembinaan olahraga
- 3. Seksi sarana dan prasarana.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi

Kebudayaan adalah aspek yang sangat luas yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan adat istiadat atau bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. serta pelestarian dan pengembangan budaya dan memiliki nilai yang menandatangani ekonomi sebagai tempat wisata bagi masyarakat dan menunjang perekonomian masyarakat serta kebudayaan sebagai khazanah sejarah suatu bangsa/masyarakat yang tercermin dalam pengakuan/kesaksiannya dan nilai-nilainya, yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan ideal dan makna rohaniah yang bebas dari kontradiksi ruang dan waktu sekitar. Agar dapat terwujudnya tujuan wisata, yang berbudaya serta menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan tidak berinding, dan beratap. Struktur cagar budaya susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 terdapat beberapa langkah-langkah untuk menjaga cagar budaya yaitu :

Tabel 5.1. Indikator dan Subindikator

Indikator	Sub Indikator
Pelestarian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. 3. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. 4. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya 5. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. 6. Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya.

Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. 2. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. 4. Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. 5. Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. 6. Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan kedatangan wisatawan diharapkan terbukanya peluang ekonomi/ kesempatan kerja bagi masyarakat, serta adanya peningkatan penerimaan daerah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan objek Pariwisata tidak boleh bertentangan dengan agama dan budaya, menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan secara terencana dan berkesinambungan.

5.1.1 Pelestarian

Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnaan atau kerusakan pengawetan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, serta upaya melindungi kemampuan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan dan menjaga kestabilan lingkungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan beberapa upaya yang terdapat dalam misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu:

1. Meningkatkan SDM di bidang kepariwisataan yang dapat mengelola potensi budaya, kesenian dan alam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata domestik maupun manca negara.
2. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.
3. Mempromosikan secara luas tentang Kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.
4. Menyusun dan memberlakukan regulasi tentang perusahaan bidang kepariwisataan dalam rangka pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus dapat melaksanakan tugas agar terwujudnya misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 5.2. Pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berdasarkan hasil study kelayakan yang dapat dipertanggung jawab kan secara akademis, teknis dan administrasi

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	2	7,7%
2	Tercapai	8	30,8%
4	Kurang Tercapai	10	38,5%
5	Tidak Tercapai	6	23,1%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari Tabel diatas kita bisa melihat tanggapan responden sudah kurang Tercapai terhadap Pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berdasarkan hasil study kelayakan yang dapat dipertanggung jawab kan secara akademis, teknis dan administrasi Karena dari 26 responden 10 diantaranya menyatakan kurang setuju atau 38,5 % menyatakan kurang tercapai.

Berdasarkan jawaban responden tersebut sudah bisa dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan tugasnya belum sesuai dengan prosedur sehingga masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Pernyataan yang diberikan masyarakat sangat bertentangan dengan apa yang penulis dengarkan dari pihak instansi pemerintah yaitu pada saat penulis mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bapak **Prof. H. Indra Suandi, ST, M. Si** saat menyatakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sudah melakukan pelestarian cagar budaya berdasarkan hasil study kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis dan administrasi menyatakan bahwa :

“Atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , dalam pelestarian cagar budaya kita selalu melakukan meninjau lokasi-lokasi, seperti pelestarian benda bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan yang pernah ada dikuantan singingi serta benda-benda bersejarah masa penjajahan, seperti, rumah adat, alat musik, alat-alat perang,keberadaan jalur, dan keberadaan cagar budaya lainnya, seperti memperbaiki balai-balai adat, halaman pencak silat, tetapi berdasarkan usulan-usulan pertahun, tidak rutinitas karna kita baru mencoba mebangkit budaya lokal yang ada di daerah yang harus kita angkat menjadi sebuah kerifan lokal ini yang kita bina secara bertahap ini yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan akan kita buktikan secara akademisi(senin 19Agustus 2019 09.45 Wib).

Tabel 5.3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pelestarian cagar budaya sudah mengkoordinasikan sesuai dengan tenaga ahli pelestarian

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	1	3,8%
2	Tercapai	5	19,2%
4	Kurang Tercapai	15	57,8%
5	Tidak Tercapai	5	19,2%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tanggapan responden diatas menjawab tentang dalam pelestarian cagar budaya sudah mengkoordinasikan sesuai dengan tenaga ahli pelestarian oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan fungsinya menyatakan kurang setuju dari 26 orang responden ada 15 responden menjawab kurang setuju atau 57,8%.

Setiap instansi pemerintah haruslah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan acuan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Sehingga masyarakat merasakan adanya kegunaan instansi-instansi tersebut serta masyarakat tidak kecewa karena kurangnya sosialisasi, dikarenakan anggaran pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang sangat minim pada saat ini. Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan, penulis menemukan fungsinya dalam pengembangan nilai-nilai budaya tradisional Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi tidak sesuai dengan yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya. Begitu juga dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan **Prof. H. Indra Suandi, ST, M.Si.**

“Sebenarnya kita sudah berusaha dan mempunyai wacana terhadap pelestarian cagar budaya tradisional dan sudah mengkoordinasikan kepada pihak terkait seperti para ahli arkeolog, Dinas Kebudayaan Provinsi dan pihak kementerian serta kita mengkoordinasikan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Cuma sejauh ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki keterbatasan yang tersedia yaitu dari sumber daya manusia dan anggaran yang sangat minim untuk perawatan nilai-nilai budaya tersebut, karena tidak dapat kita pungkiri dalam pengembangan tersebut kita harus butuh anggaran yang lumayan besar, oleh sebab itu sejauh ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, belum semaksimal mungkin melakukan pengembangan nilai-nilai budaya tradisional Kabupaten Kuantan Singingi, dan saya sendiri selaku kepala dinas belum sampai satu tahun menjabat disini (Senin, 19 Agustus 2019, jam 10.15 Wib)”.

Tabel 5.4. Dalam melestarikan cagar budaya pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal.

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	1	3,8%
2	Tercapai	3	11,5%
4	Kurang Tercapai	18	69,4%
5	Tidak Tercapai	4	15,3%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden menyatakan kurang tercapai kalau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah melestarikan cagar budaya dan mempertimbangkan kemungkinan dilakukan pengembalian ke kondisi awal, karena dari 26 orang responden ada 18 orang atau 69,4% yang menyatakan kurang tercapai.

Pemerintah harus teliti dalam hal ini terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar pelestarian cagar budaya dilaksanakan dan mempertimbangkan pengembalian cagar budaya ke kondisi awal, agar karakteristik daerah tetap ada, dan masyarakat mengetahui cagar budaya dan masyarakat mengetahui sejarah yang ada di daerah Kuantan Singingi, sehingga daerah kuantan singingi bisa dijadikan objek wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kuantan singingi.

Ketika penulis mewancarai kepala seksi cagar budaya ibu **Ratna Sari, S.Pd** tentang mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

“Kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah melakukan pendataan terhadap cagar-cagar budaya dan benda sejarah di kabupaten kuantan singingi yaitu terdapat di 15 kecamatan di kabupaten kuantan singingi, mulai dari daerah lubuk jambi sampai cerenti, yaitu seperti cagar budaya peninggalan kerajaan kandis, dapat dibuktikan melalui batu yg bertulis tulisan sangsakerta,serta baru baru ini ditemukan artefak berbentuk batu nisan, jika diteliti, benda tersebut ada semenjak abad 2 Masehi jaman kerajaan, dan ada seperti tank baja dan makam-makam tokoh bersejarah, namun hanya pendataan memang tidak dilestarikan karna tidak ada peraturan daerah yang mengatur, Dinas hanya berpatokan kepada Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (Senin 19 Agustus 2019, jam 10.23)”.

Tabel 5.5. Pelestarian cagar budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah di dukung oleh kegiatan dokumentasi

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	3	11,5%
2	Tercapai	12	46,1%
4	Kurang Tercapai	9	34,6%
5	Tidak Tercapai	2	7,7%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tanggapan responden diatas tentang Pelestarian cagar budaya yang sudah di dukung oleh kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berdasarkan tempat cagar budaya yang terdapat di 15 kecamatan kabupaten kuantan singingi menyatakan setuju karena dari 26 orang responden ada 12 orang atau 46,1% yang menyatakan setuju.

Sesuai dengan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang pengkajian sejarah, museum dan nilai tradisional point a pasal 15 yaitu: Melaksanakan pengumpulan dokumentasi, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data pengkajian sejarah, cagar budaya, museum dan nilai tradisional

Berdasarkan fungsi tentang pengkajian sejarah, museum, dan nilai tradisional tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan haruslah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada sehingga masyarakat mengetahui cagar budaya serta sejarah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ketika penulis mewawancarai bapak Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan **Drs. Suhardi, M.Si** beliau menyatakan :

“dokumentasi tentang cagar budaya sudah kita lakukan, tidak hanya dokumentasi kita juga sudah melakukan pendataan cagar budaya seperti meriam peninggalan raja ismail yang ada di kecamatan kuantan hilir Seberang serta makam-makam tokoh yang ada di 15 kecamatan tersebut, namun kita terkendala dengan tanggapan masyarakat yang tidak ingin benda cagar budaya tersebut dilestarikan, karna ada beberapa cagar budaya yang disimpan masyarakat dan masyarakat tidak ingin benda tersebut diletakkan di satu tempat, kita museum memang belum ada, Cuma wacana untuk pembuatan museum tersebut sudah ada (Senin, 19 Agustus 2019 jam: 10.58)”

Ketika penulis menanyakan mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian

Prof. H. Indra Suandi, ST, M.Si menyebutkan:

“ Tujuan kita yaitu mengali nilai nilai budaya agar tetap terjaga, sehingga nilai itu bisa berkelanjutan dimasa akan datang anak cucu kita bisa mengetahui dan menikmati nya, secara fisik akan kita revitalisasi cagar budaya tersebut ke bentuk awal, seperti rumah adat, Kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sudah melakukan pendataan terhadap cagar-cagar budaya dan benda sejarah dikabupaten kuantan singing yaitu terdapat di 15 kecamatan di kabupaten kuantan singingi, mulai dari daerah lubuk jambi sampai cerenti, yaitu seperti cagar budaya peninggalan kerajaan kandis, dapat dibuktikan melalui batu yg bertulis tulisan sangsakerta, ada seperti tank baja dan makam-makam tokoh bersejarah, namun hanya pendataan memang tidak dilestarikan karna tidak ada peraturan daerah yang mengatur, Dinas hanya berpatokan kepada Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (senin 19 Agustus 2019 jam 10.23”.

5.2 Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti, mengayomi, mecegah, mempertahankan, dan membentengi sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Melindungi berarti meberikan rasa aman, tempat berlindung baik fisik maupun mental dari pihak manapun. Baik yang berupa makhluk hidup maupun terhadap sebuah benda yang dilindungi keberadaanya, dan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kuantan Singingi terkhususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam konsep kerja operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada termasuk perlindungan cagar budaya hanya ada beberapa konsep kerja operasional yaitu:

1. Pembinaan SDM di bidang Kepariwisataaan.
2. Pengembangan nilai-nilai budaya tradisional Kuantan Singingi.

3. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah.
4. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Promosi dan dokumentasi.
6. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan restribusi kepariwisataan.

Dari beberapa konsep kerja operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak termasuk perlindungan cagar budaya, seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mampu melindungi cagar budaya tersebut melalui konsep kerja operasional.

Tabel 5.6. Masyarakat sudah mengetahui bahwa bisa ikut berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya.

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	1	3,8%
2	Tercapai	6	23,1%
4	Kurang Tercapai	16	61,5%
5	Tidak Tercapai	3	11,5
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tanggapan responden diatas tentang Masyarakat sudah mengetahui bahwa bisa ikut berperan serta melakukan perlindungan cagar budayasudah berdasarkan dewan kesenian cabang kecamatan menyatakan kurang setuju karena dari 26 orang responden ada 16 orang atau 61,5% yang menanggapi kurang setuju.

Ketika mewawancarai bapak **Prof. H. Indra Suandi, ST, M. Si** selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa :

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah melakukan seminar dan sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus nya dewan kesenian cabang kecamatan tentang pentingnya masyarakat ikut berperan dalam perlindungan cagar budaya, namun beberapa masyarakat yang mengetahui tidak terlalu ikut melindungi, karna kendala nya masyarakat tidak mengetahui bahwa itu cagar budaya yang dilindungi dan tidak mengetahui sejarah cagar budaya tersebut (Senin, 19 Agustus 2019 jam: 09.45)”

5.3 Penyelamatan

Penyelamatan adalah kegiatan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan, menghindarkan atau membebaskan dari bahaya yang hilang atau yang membutuhkan pertolongan dan yang mengkhawatirkan. Sehingga terbentuk keselamatan, kesejahteraan kebahagiaan yang berbentuk niatdoa dan perbuatan, penyelamatan tersebut baik dalam berbentuk benda atau cagar budaya yang kurang terawat dikabupaten kuantan singingi. Beracuan kepada peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bagian ke tiga bidang kebudayaan pasal 11 nomor tiga poin a, b, c, d, e, yaitu Kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan, pengajaran sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengembangan kebudayaan, pengajaran, museum dan nilai tradisional kesenian.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kebudayaan, pengajaran sejarah, museum dan nilai tradisional kesenian.

- d. Pengkoordinasian pengelolaan pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional kesenian.
- e. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kebudayaan, pengajian, museum dan nilai tradisional, kesenian.

Melalui peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 25 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mereleasasikan tugas dan fungsi tersebut.

Tabel 5.7. Pemerintah Sudah Mesosialisasikan Kepada Masyarakat Bahwa Penyelamatan Cagar Budaya Dilakukan Dalam Keadaan Darurat Dan Keadaan Biasa.

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	2	7,6%
2	Tercapai	11	42,3%
4	Kurang Tercapai	10	38,5%
5	Tidak Tercapai	3	11,5%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa tanggapan responden tentang Pemerintah sudah mesosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyelamatan cagar budaya dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan dewan kesenian cabang kecamatan penyelamatan cagar budaya tersebut menyatakan setuju karena dari 26 orang responden ada 11 orang atau 42,3% yang menyatakan setuju.

Dalam melaksanakan penyelamatan cagar budaya dan benda-benda bersejarah tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi memang harus dilakukan dengan cara turun ke kecamatan-kecamatan yang memiliki cagar budaya tersebut, karena sesuai dengan peraturan bupati tentang rincian tugas seksi pengkajian sejarah museum dan nilai tradisional yaitu Melaksanakan pengumpulan, dokumentasi, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data pengkajian sejarah ,museum dan nilai tradisional.

Begitu juga saat penulis mewancari kepala seksi cagar budaya ibu **Ratna Sari, S.Pd** yang menyatakan :

“penyelamatan cagar budaya dan kegunaan cagar budaya tersebut masyarakat harus mengetahuinya baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa, dikarenakan cagar budaya tersebut harus tetap dilestarikan dan tetap terjaga keasriannya, sehingga mempunyai daya tarik yang membuktikan wilayah kuantan singingi kaya akan kebudayaan dan sejarah lokal, yang mana cagar budaya tersebut terdapat di 15 kecamatan di kabupaten kuantan singingi (Senin, 19 Agustus 2019 jam : 10.23)”.

Tabel 5.8. Masyarakat Sudah Mengetahui Bahwa Cagar Budaya Yang Terancam Rusak, Hancur Atau Musnah Dapat Dipindahkan Ke tempat Yang Aman

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	-	0%
2	Tercapai	5	19,2%
4	Kurang Tercapai	13	50,0%
5	Tidak Tercapai	8	30,8%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tanggapan responden diatas tentang masyarakat sudah mengetahui bahwa cagar budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan

ketempat yang aman menyatakan kurang setuju karena dari 26 orang responden ada 13 orang atau 50% yang menyatakan kurang setuju.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang cagar budaya No 11 Tahun 2010 Pasal 59 bahwa cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ketempat yang lebih aman karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menyediakan tempat untuk cagar budaya yang hancur terancam punah, bahkan sudah hilang, Karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak melestarikan, karena memang tidak memiliki perda untuk cagar budaya, hanya beracuan kepada Undang-Undang dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga baru berupaya untuk mengembangkan kebudayaan, dan cagar budaya lokal. Ketika penulis mewawancarai bapak **Prof. H. Indra Suandi, ST, M. Si** selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyatakan bahwa :

“memang daerah kuantan singingi banyak memiliki cagar budaya dan itu disetiap kecamatan ada cagar budaya nya, baik berbentuk benda peninggalan kerajaan, peninggalan masa penjajahan, dan beberapa alat musik tradisional, namun dalam hal ini kita terkendala akses yang akan ditempuh karena fasilitas umum, seperti jalan aspal belum ada, Cuma ada jalan pengerasan dan kita tidak bisa melewati akses tersebut, dan, cagar budaya tersebut juga ada yang dimiliki masyarakat, namun masyarakat enggan untuk mengamankan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan cagar budaya tersebut sudah ada yang dijual oleh masyarakat sehingga tidak tau keberdaanya lag karna itu cagar budaya terancam rusak atau punah kita tidak dapat merawat nya dengan baik (Senin, 19 Agustus 2019 jam: 09.45 Wib)”

Pernyataan yang diberikan oleh bapak **Prof. H. Indra Suandi, ST, M. Si** tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan undang-undang republik indoneisia tentang cagar budaya No 11 Tahun 2010 Pasal 58 penyelamatan cagar budaya

dilakukan untuk mencegah faktor kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.

Tabel 5.9. Pemerintah Dalam Melakukan Penyelamatan Wajib Menjaga Dan Merawat Cagar Budaya Dari Pencurian, Pelapukan, Atau Kerusakan Baru.

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tercapai	2	7,7%
2	Tercapai	4	15,4%
4	Kurang Tercapai	16	61,5%
5	Tidak Tercapai	4	15,4%
Jumlah		26	100%

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa tanggapan responden tentang pemerintah dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak tepat karena dari 26 orang responden ada 16 orang responden atau 61,5% yang menyatakan kurang setuju.

Dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru, sehingga banyak masyarakat yang merasa kesal bahkan tidak mengetahui bahwa ada cagar budaya dan sejarah daerah kabupaten kuantan singingi. Dalam penelitian penulis memang menemukan hal serupa bahwa sering cagar budaya dan benda-benda bersejarah tersebut tidak terawat bahkan sudah hilang dan tidak diketahui keberadaanya.

Hal tersebut bertentangan dengan apa yang diblang oleh kepala bidang kebudayaan yaitu Bapak **Suherman Yusuf, S.Pd, MM** selaku kepala bidang kebudayaan, menyatakan bahwa :

“sebetulnya kami sudah bekerja seefektif mungkin dalam penyelamatan cagar budaya dan benda-benda bersejarah di kabupaten kuantan singingi, namun masih terkendala anggaran untuk melakukan penyelamatan tersebut, karena kita tidak dapat dipungkiri juga kita melakukan tugas butuh dana juga, dan selain itu masyarakat sebenarnya tau itu cagar budaya, Cuma tidak mau melakukan penyelamatan karna di anggap tidak penting (senin 19 Agustus 2019 jam:10.15 Wib)”.

5.4 Rekapitulasi Pembahasan Kuesioner

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahsan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap StrategiDinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.10. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap StrategiDinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator-Indikator	Tanggapan Responden				Jumlah
		ST	T	KT	TT	
	Pelestarian					
1	Pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah berdasarkan hasil study kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis dan administrative	2	8	10	6	26
2	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan pelestarian cagar budaya sudah	1	5	15	5	26

	mengkoordinasikan sesuai tenaga ahli pelestarian					
3	Dalam melestarikan Cagar Budaya Pemerintah harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal .	1	3	18	4	26
4	Pelestarian cagar Budaya yang dilakukan Pemerintah sudah di dukung oleh kegiatan dokumentasi	3	12	9	2	26
Perlindungan						
5	Masyarakat sudah mengetahui bahwa bisa ikut berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya.	1	6	16	3	26
Penyelamatan						
6	Pemerintah sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyelamatan Cagar Budaya itu dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan biasa.	2	11	10	3	26
7	Masyarakat sudah mengetahui bahwa Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ketempat yang aman.	-	5	13	8	26
8	Masyarakat dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian atau kerusakan.	2	4	16	4	26
Frekuensi		12	54	107	35	208
Jumlah rata-rata		6	26	51	17	100
Persentase		5,8	26	51,4	16,8	100

Sumber: Hasil Modifikasi Penelitian Tahun 2019

Dari rekapitulasi tabel di atas dapat diketahui frekuensi option sebagai berikut :

A = 12

B = 54

C = 107

D = 35

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi pada tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} N &= Fa + Fb + Fc + Fd \\ &= 12+54+107+35 \\ &= 208 \end{aligned}$$

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 4

Option B dengan bobot 3

Option C dengan bobot 2

Option D dengan bobot 1

Dari bobot yang diberi nilai di atas, maka dapatlah di peroleh F sebagai berikut :

$$\text{Frekuensi option A} = 12 \times 4 = 48$$

$$\text{Frekuensi option B} = 54 \times 3 = 162$$

$$\text{Frekuensi option C} = 107 \times 2 = 214$$

$$\text{Frekuensi option D} = 35 \times 1 = 35$$

$$\text{Jumlah } F = 459$$

Berdasarkan jumlah yang di peroleh diatas maka dapat dicari persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

Keterangan:

F : Frekuensi

P : Persentase

N : Populasi

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

N

$$F = 459$$

$$N = 208 \times 4 = 832$$

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

N

$$P = \frac{459}{832} \times 100\%$$

$$= \frac{45900}{832}$$

$$P = 55,16\%$$

$$= 55,16\%$$

$$P = 55,16\%$$

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam penilaian jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003: 43) cara sebagai berikut:

Sangat Tercapai/Maksimal	: 76 - 100%
Setuju/Kurang Tercapai	: 56 - 75%
Kurang Tercapai/Tidak Maksimal	: 40 - 55%
Tidak Tercapai /Sangat Tidak Maksimal	: 0 – 39%

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat kekurangan, karena responden yang menyatakan Kurang Setuju adalah 55,16%.

Sebagai Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi dari Pemerintahan. Sehingga terjadinya kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan Cagar Budaya yang ada di daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menghasilkan pelestarian sumber pariwisata terutama Cagar Budaya yang pasti akan memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat, baik dampak ekonomi atau yang lainnya.

5.5 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan Cagar Budaya yang ada

Dalam mengembangkan cagar budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan beberapa upaya baik dalam bidang kesenian, cagar budaya, kebudayaan dan pariwisata yaitu:

Tabel 5.11. Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Upaya – Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengembangan Cagar Budaya
1	Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengembangan kebudayaan
2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengembangan kebudayaan seta cagar budaya
3	Melaksanakan pemetaan kebutuhan serana prasarana pengembangan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian
4	Menyiapkan bahan telaahan pengembangan kebudayaan menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengembangan kebudayaan, cagar budaya, serta kesenian

5	Melakukan pembinaan pengembangan kebudayaan cagar budaya serta kesenian
6	Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan kebudayaan, cagar budaya serta kesenian
7	Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi pengembangan Kebudayaan, cagar budaya serta kesenian
8	Melakukan pendataan cagar budaya yang ada di lima belas kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi
9	Meningkatkan kinerja pegawainya baik dalam menerima laporan tentang keberdaan cagar budaya dari masyarakat

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Upaya upaya tersebut tidak dilakukan secara efektif hanya bersifat pendataan tanpa adanya peraturan daerah yang lebih mengikat sehingga bisa meningkatkan nilai cagar budaya yang sesuai dengan UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2010, melakukan pelestarian, perlindungan, penyelamatan.

5.6 Hambatan-Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai instansi sebagian tugas negara tentunya mempunyai peran penting dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat, namun dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan-hambatan baik dari pihak pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri seperti kurang keseriusan pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta kurang kesadaran masyarakat dalam hal urusan yang berhubungan dengan pemerintah beberapa hambatan yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :

Tabel 5.12. Hambatan Dalam Pengembangan Cagar Budaya

NO	Hambatan-Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya Kabupaten Kuantan Singingi
1	Anggaran pendapatan daerah yang tidak memadai untuk perlindungan, pelestarian, penyelamatan cagar budaya.
2	Terbatasnya pengetahuan pegawai tentang cagar budaya
3	Data dan bukti cagar budaya yang tidak memadai, dikarenakan beberapa cagar budaya sudah tidak berada ditempat dan hilang
4	Akses menuju cagar budaya yang tidak memadai, serta fasilitas yang tidak mendukung untuk menuju lokasi cagar budaya
5	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya
6	Kurangnya sumber daya manusia terhadap pengetahuan cagar budaya

Dari beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan penulis juga mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bapak **Prof. H. Indra Suandi, ST, M. Si**, mengatakan bahwa :

“Sebetulnya pemerintah sudah berupaya keras dalam menjalankan tugasnya akan tetapi kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta ada sifat menganggap, cagar budaya tersebut itu tidak penting yang membuat banyaknya terjadi cagar budaya di daerah kuantan singingi ini tidak terdata dan terawat dengan baik karena ketika kita data dan sosialisasikan masyarakat acuh tak acuh, terkadang memang sengaja karena benda cagar budaya yang mereka temukan atau memang dari keturunan kerajaan tidak ingin memberi tahu, karena keberadaan benda tersebut dianggap sakral, serta kita terkendala oleh akses menuju tempat cagar budaya tersebut, yang memang terkadang terdapat di hutan-hutan dan tempat yang susah ditempuh (Senin, 19 Agustus 2019, jam 09.45 Wib)”.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dibahas pada bab awal untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut :

6.1.1 Pengembangan Cagar Budaya

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, menyatakan **Kurang Setuju/Tidak Maksimal**. Sesuai dengan hasil rekapitulasi keseluruhan kuesioner pada tabel 5.10 hal 115, yaitu sebanyak 55,16%. Dikatakan kurang setuju atau tidak maksimal karena dalam pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan, Perawatan dan Perlindungan cagar budaya serta banyak cagar budaya yang tidak terselamatkan diakibatkan oleh kurangnya kepedulian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga masyarakat kurang mengetahui sejarah kabupaten kuantan singingi dan letak-letak cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi, yang bisa dijadikan objek wisata budaya serta meningkatkan perekonomian daerah serta masyarakat dalam pariwisata, sesuai dengan motto Indonesia saat ini yaitu "*wonderful*

indonesia” Riau terkhususnya Kuantan Singingi mempunyai cagar budaya yang bisa dijadikan objek wisata. Dan dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi, program kerja dan tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam mengembangkan cagar budaya dan wisata sejarah di Kuantan Singingi. Untuk mengetahui kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan cagar budaya dan wisata sejarah kuantan singingi, tujuan penelitian dapat dibuktikan dari hasil penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tidak tepat strateginya sebagai instansi kebudayaan yang melestarikan, melindungi dan menyelamatkan cagar budaya dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasakan adanya kinerja dinas tersebut dan tidak mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

6.2 Saran

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan haruslah memperhatikan ketentuan yang ada, seperti peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak terjadi ketidaktahuan ditengah masyarakat akan cagar budaya dan sejarah. Serta menimbulkan rasa ingin menjaga melindungi serta melestarikan cagar budaya tersebut.

2. Masyarakat atau Penduduk

Sebagai warga negara yang baik masyarakat haruslah mematuhi semua aturan yang berlaku dalam negara, dalam pengembangan cagar budaya

masyarakat seharusnya mengetahui dan menjaga cagar budaya tersebut, serta masyarakat yang mempunyai cagar budaya harus menjaga, melindungi, melestarikan serta menginformasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar tetap terjaganya cagar budaya serta sejarah yang menjadi karakteristik Kabupaten Kuantan Singingi. Karena terjalannya kerjasama yang baik dari pihak pemerintahan dengan dukungan masyarakat tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia terutama dalam cagar budaya dan sejarah.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Silichin. 2004. *Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, ed.2, cet.4*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2008. *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: ALFABETA
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1997. *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen Dan Manajemen Kantor*. Jakarta: Gunung Agung.
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Choliq, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Daryanto, H.M. 2006. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Desky, M.A. 2001. *Manajemen Perjalanan Wisata*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Diversifikasi Produk Wisata *Menyongsong Melenium Ketiga*. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
- Eka Asih Putriana Taim, S.S. 2012 *Situs padang candi, sebuah situs era Sriwijaya dan prospeknya di masa datang*. Puslitbang arkernas Jakarta
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan*: Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*: Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen*: Bumi Aksara, Jakarta.
- Hakim, EM.Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Istianto, Bambang. 2005. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

I Nyoman. 1998. *Aspek Budaya Makanan Tradisional dalam Menunjang Program Pariwisata dalam Dinamika Kebudayaan*

Intruksi Presiden *Nomor 16 Tahun 2005* tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Kansil, C.S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia edisi revisi*: Bumi Aksara, Jakarta.

Kencana Syafiie, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Pebri Mahmud 2009, *Kerajaan Kandis Atlantis Nusantara antar cerita dan fakta*, ufuk Jakarta

Pebri Mahmud 2010 (*sebuah hipotesa lokasi awal peradaban di indoneisia*) *peradaban atlantis Nusantara*, ufuk Jakarta

_____. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

P. Siagian, Sondang. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah *Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam*

Ruslan. Rosady. 1997, *Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*: Alfabeta, Bandung

Suardi MS, 2010 *Sejarah Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi*, Pemkab Kuansing.

Suardi MS, 2010, *Pemutahiran Adat dan Cagar Budaya*

Suwantoro, Gamal, 1997, *Dasar-dasar pariwisata*. Andi: Yogyakarta.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(UU RI NO 10 Thn 2009) Tentang Kepariwisata

(UU NO 11 Thn 2010) Tentang Cagar Budaya